



ONE OJK
Bakti Membangun Negeri

PEMENANG LOMBA ARTIKEL DAN FOTO

UNTUK JURNALIS 2020

Peran penting OJK
Menjaga Perekonomian
di Masa Pandemi



JUARA 1

ARTIKEL JURNALISTIK

**Abdul Malik
Bareksa**

Geliat Investor Ritel Sokong Pasar Modal di Masa Pandemi

OJK terus lakukan pendalaman pasar dan telah merilis 35 Kebijakan di bidang pasar modal memitigasi dampak pandemi

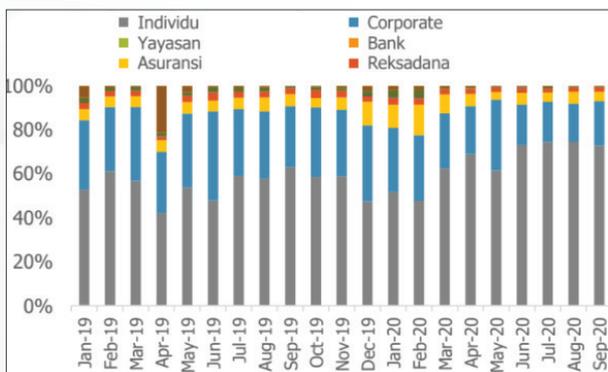


Ilustrasi investor milenial yang berinvestasi di saham, reksadana dan SBN secara online. (Shutterstock)

Dulu, investor ritel mungkin tidak banyak dilirik keberadaannya karena nilai transaksinya yang kecil dan tidak seberapa dibandingkan dengan investor asing yang nilai transaksinya bisa menggegerkan bursa saham. Namun, lambat laun taring investor ritel mulai kelihatan dan menunjukkan tajamnya pada masa krisis, terutama saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investor individu menopang kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah net sell investor asing pada periode 27 Oktober 2020. Dari data disebutkan, transaksi dari investor ritel berkontribusi hampir 80 persen dari total transaksi investor domestik. Sedangkan sisanya dikontribusi oleh korporasi, asuransi, bank, yayasan dan reksadana.

Kontribusi Investor Ritel



Sumber : OJK

Padahal di periode yang sama atau pada 27 Oktober 2020, investor asing tercatat melakukan net sell Rp47,3 triliun di pasar saham dan Rp106,03 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Meskipun, pada awal 2020, investor asing masih tercatat melakukan net buy Rp3 triliun di pasar saham dan Rp15,2 triliun di pasar SBN.

Berkat kinerja investor ritel ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di masa pandemi Covid-19 ini masih tertolong dan bertahan di level 5.000, tepatnya 5.128 pada 27 Oktober 2020. Meskipun IHSG ini menurun 18,59 persen secara year to date (YtD), namun kinerja IHSG ini masih lebih baik dibandingkan dengan bursa saham Inggris yang menurun 24,04 persen.

Beberapa sektor saham juga menunjukkan perbaikan. Seperti sektor perdagangan yang menguat 1 persen, sektor keuangan 1,11 persen, sektor pertanian 3,23 persen dan sektor properti 2,23 persen.

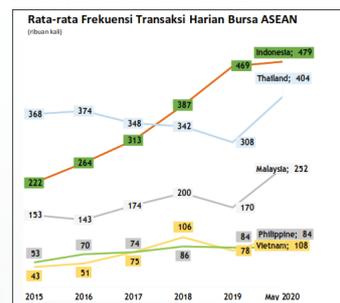
Frekuensi Transaksi

Kontribusi investor ritel ini terlihat jelas dari meningkatnya frekuensi transaksi selama pandemi Covid-19. Sistem kerja dari rumah (work from home) dan keakraban dengan teknologi membuat jumlah transaksi harian dari investor ritel meningkat signifikan selama masa pandemi Covid-19.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan sebelum ada Covid-19, jumlah investor yang aktif bertransaksi mencapai 42-51 ribu investor. Namun, setelah adanya pandemi Covid-19, jumlah investor ritel yang aktif bertransaksi mencapai 93 ribu hingga puncaknya mencapai 112 ribu transaksi pada 24 Juli 2020. "Pertumbuhan investor aktif yang melakukan transaksi harian meningkat 100 persen jika dibandingkan tahun lalu," ujar dia belum lama ini.

Seiring dengan peningkatan investor yang aktif bertransaksi, nilai transaksi harianpun juga tercatat meningkat. Selama masa pandemi Covid-19, nilai transaksi harian tercatat stabil di level Rp7,7 triliun per hari. Bahkan nilai transaksi harian sempat menembus angka Rp9,3 triliun per hari pada Mei 2020.

Frekuensi Transaksi di ASEAN



Sumber : BEI

Dengan peningkatan tersebut, frekuensi transaksi harian Indonesia tercatat tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada Mei 2020, frekuensi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia mencapai 479 ribu kali atau lebih tinggi dari Thailand yang mencapai 404 ribu kali. Padahal pada 2017, Indonesia sempat kalah dari Thailand dengan menempati posisi nomor dua dengan 313 ribu kali transaksi.

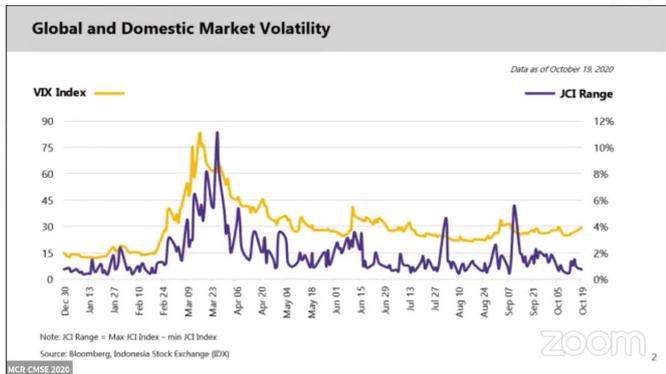
Jumlah Investor

Dari sisi jumlah, investor domestik ini juga terus mengalami peningkatan. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, per 16 Oktober 2020, jumlah investor domestik meningkat 34,78 persen menjadi 3,34 juta investor dari periode akhir 2019 yang sebesar 2,48 juta investor.

Direktur Utama KSEI Urief Budhi Prasetyo, mengatakan pertumbuhan investor selama sekitar 10 bulan terakhir ditopang oleh pertumbuhan investor reksadana 49,4 persen dan investor Surat Berharga Negara (SBN) 37,1 persen. Pertumbuhan juga dicatatkan oleh investor saham yang meningkat 27,87 persen.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia, Laksono W. Widodo, mengatakan sepanjang tahun ini merupakan tahun sulit bagi pasar modal seluruh dunia, karena pandemi Covid-19 telah mengakibatkan gejolak pasar. Sepanjang tahun ini, pasar saham Indonesia mengalami volatilitas cukup tinggi, utamanya di masa awal pandemi. Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terpuruk di titik terendahnya pada 24 Maret 2020 di level 3.937.

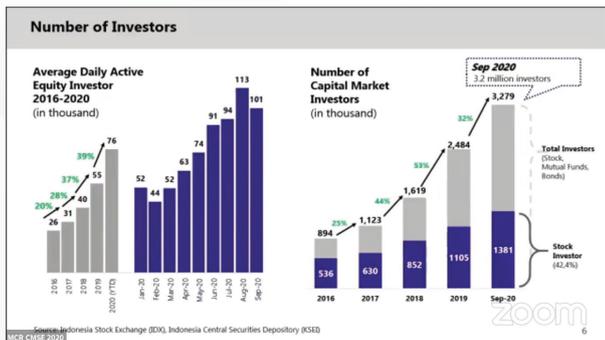
“Namun sejak Juli volatilitas pasar mereda, kemudian pasar mulai bergerak stabil. Pasar kita memang belum pulih seperti sebelum masa pandemi, namun lebih stabil karena peran investor ritel dalam negeri,” ujar Laksono (21/10/2020).



Sumber : BEI

Laksono mengatakan kini pasar modal Indonesia memiliki basis investor ritel domestik yang kuat, guna menopang kinerja pasar modal di masa sulit seperti selama masa pandemi Covid-19 saat ini. Berdasarkan profilnya, kebanyakan investor ritel tersebut ialah generasi milenial.

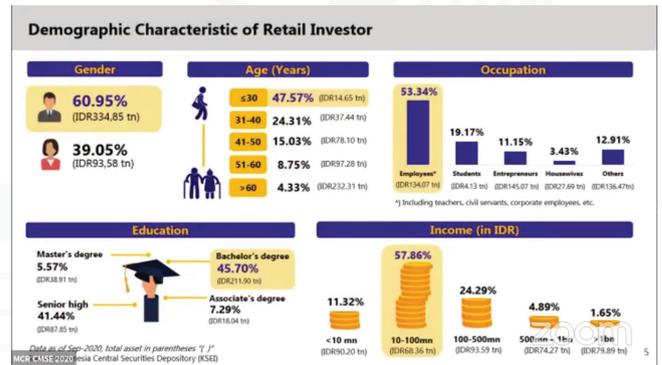
Jumlah Investor



Sumber : BEI

Menurut catatan BEI, sekitar 48 persen investor ritel merupakan generasi milenial dengan usia di bawah 30 tahun. Kemudian investor berusia 31-40 tahun menyumbang 24,31 persen terhadap komposisi investor ritel, disusul investor berusia 41-50 tahun 15,03 persen. Berdasarkan jenis kelamin, 60,95 persen investor pria dan 39,05 persen wanita. Mayoritas atau 53,34 persen investor ritel bekerja sebagai karyawan, disusul 19,17 persen adalah mahasiswa atau pelajar. Dari sisi jenjang pendidikan, terbesar atau 45,7 persen investor ritel merupakan lulusan sarjana strata satu, disusul lulusan SMA 41,44 persen.

“Mayoritas mereka atau 57,86 persen memiliki pendapatan per tahun Rp10 juta hingga Rp100 juta, kemudian 24,29 persen investor ritel memiliki pendapatan Rp100 juta hingga Rp500 juta per tahun. Mereka masuk golongan kelas menengah Indonesia,” kata Laksono.



Sumber : BEI

Dari data tersebut dapat dikatakan sekitar 70 persen investor pasar modal Indonesia berada pada usia muda. Kepemilikan investor muda tersebut meningkat dibandingkan akhir Desember 2019.

Investor Reksana dan SBN

Sejatinya pertumbuhan jumlah investor ritel domestik tidak hanya dibuktikan di pasar saham, industri reksadana membukukan lonjakan serupa. Data KSEI menunjukkan jumlah SID reksadana sebanyak 2,58 juta per 30 September 2020 atau melonjak signifikan dibandingkan akhir 2019 yang baru 1,77 juta investor.

Jumlah Investor Reksadana

Tahun	Jumlah investor	Pertumbuhan YoY (%)
2017	622.545	
2018	995.510	59,91
2019	1,77 juta	78,25
September 2020	2,58 juta	45,76

Sumber : KSEI, berbagai sumber diolah Bareksa

Tidak berbeda jumlah investor SBN juga melesat, dari 316.263 investor jadi 397.781 investor atau hampir tembus 400.000 investor pada Agustus 2020. Lonjakan jumlah investor reksadana dan SBN utamanya ditopang oleh penjualan melalui platform online dan semakin terjangkanya nilai investasi reksadana dan SBN bagi masyarakat.

Jumlah Investor SBN

Tahun	Jumlah investor	Pertumbuhan YoY (%)
2017	128.474	
2018	195.277	52
2019	316.263	61,96
Agustus 2020	397.781	25,77

Sumber : KSEI, berbagai sumber diolah Bareksa

Kenaikan jumlah investor tersebut sejalan dengan naiknya dana kelolaan reksadana dan penjualan SBN Ritel yang makin diminati. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam

paparannya mengatakan dana kelolaan reksadana kembali naik pada Oktober 2020 dan semakin mendekati level sebelum pandemi akhir tahun lalu, setelah pada September sedikit tertekan secara bulanan.

Per 26 Oktober 2020 dana kelolaan reksadana tercatat Rp533,12 triliun, naik 4,5 persen atau bertambah Rp22,97 triliun dibandingkan September yang senilai Rp510,15 triliun. Nilai itu semakin mendekati level sebelum pandemi yakni pada Desember 2019 yang senilai Rp542,2 triliun. Kembali meningkatnya nilai aktiva bersih (NAB) reksadana pada Oktober, ditopang nilai berlangganan bersih (net subscription) secara month to date per 26 Oktober 2020 tercatat Rp13,57 triliun. Secara year to date, nilai net subscription reksadana mencapai Rp18,97 triliun.

“Per 26 Oktober 2020, NAB industri reksadana -1,67 persen YtD dengan nilai net subscription Rp18,94 triliun,” kata Wimboh dalam konferensi pers bulanan bertajuk Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan secara virtual di Jakarta (2/11/2020).

Tidak berbeda, penjualan SBN Ritel sepanjang tahun ini semakin mendapatkan tempat di hati investor. Hal ini dibuktikan nilai penjualan SBN Ritel, utamanya yang bersifat tradable (bisa diperdagangkan) sangat diminati investor, dengan rata-rata nilai penjualan di atas Rp12 triliun. Pencetak rekor penjualan tertinggi SBN Ritel yakni SR013 yang terjual hingga Rp25,66 triliun.

Penjualan SBN Ritel YtD hingga Oktober 2020

SBN Ritel	Tanggal Penerbitan	Realisasi Penerbitan
SBR009	27 Januari - 13 Februari	Rp2,25 triliun
SR012	24 Februari - 18 Maret	Rp12,14 triliun
ORI017	15 Juni - 9 Juli	Rp18,33 triliun
SR013	28 Agustus - 23 September	Rp25,66 triliun
ORI018	1-21 Oktober	Rp12,97 triliun

Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa

Dukungan OJK

Melihat geliat investor ritel tersebut, Wimboh mengatakan OJK akan mendukung dengan memperbanyak instrumen di pasar modal. Instrumen di pasar modal akan lebih bervariasi guna dapat memenuhi kebutuhan pasar baik melalui instrumen biasa maupun instrumen derivatif lindung nilai atau hedging. “OJK menyoroti banyak permintaan dari investor asing terkait, instrumen derivatif hedging di pasar modal yang belum lengkap,” ujar Wimboh.

Selain itu, OJK juga akan melakukan pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan infrastruktur pasar modal. Wimboh menjelaskan infrastruktur memiliki pengaruh yang besar terutama pada saat settlement dilakukan secara elektronik, centralized, cepat, dan tanpa lag, serta dapat dilakukan di mana saja. OJK meyakini, upaya pengembangan central clearing counterparty (CCP) di Indonesia menjadi suatu terobosan penting.

Wimboh menambahkan OJK juga akan memperluas pasar modal melalui implementasi digitalisasi. Program digitalisasi ini tidak hanya dikembangkan di pasar modal namun juga di seluruh sektor jasa keuangan sehingga pendalaman inklusi keuangan terutama di daerah dapat lebih cepat terwujud. OJK telah memudahkan proses penawaran umum perdana saham dengan mengoptimalkan sistem perizinan elektronik terintegrasi, sehingga tidak ada lagi redundansi proses di OJK maupun self regulatory organization (SRO). Hasilnya, penawaran umum seperti initial public offering (IPO) saham dapat dipersingkat prosesnya dari 105 hari menjadi 22 hari kerja saja.

Wimboh menjelaskan tiga upaya demi memperdalam pasar modal, sehingga bisa berkontribusi bagi pemulihan ekonomi yang solid. Di antaranya :

Pertama, memperluas akses keuangan dan mempermudah investasi. OJK akan memperluas basis pelaku industri pasar modal, baik dari sisi investor maupun perusahaan penerbitnya (issuer), sehingga tidak tergantung pada sekelompok investor saja. Hal ini termasuk melakukan sosialisasi dan

edukasi pasar modal, akses produk dan layanan di digital platform, serta penawaran perdana saham melalui elektronik (e-IPO).

Kedua, mempermudah proses memperoleh pendanaan dari pasar modal. Beberapa upaya OJK untuk memudahkan pendanaan pasar modal adalah dibuatkannya papan akselerasi untuk usaha kecil menengah, equity crowdfunding dan perizinan elektronik terintegrasi.

Ketiga, meningkatkan perlindungan investor untuk menjaga kepercayaan masyarakat. OJK akan berupaya membuat kebijakan penanganan fluktuasi pasar, penguatan market conduct dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta pengaturan disgorgement fund.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, menambahkan guna mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional, OJK turut andil dan berpartisipasi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis, khususnya di bidang pasar modal.

Sepanjang 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan di bidang pasar modal dalam merespons dampak pandemi Covid-19 yang berfokus pada tiga hal. Yaitu pertama, relaksasi bagi pelaku industri yang meliputi 12 kebijakan, kedua pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan dalam 9 kebijakan, serta ketiga adalah kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan yang meliputi 4 kebijakan.

“Dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19, OJK akan terus menjalin kerja sama dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, lembaga jasa keuangan, SRO dan asosiasi, serta pelaku industri lainnya, termasuk industri sektor riil. Dalam hal diperlukan, OJK akan kembali mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas pasar modal,” Hoesen menjelaskan.

Daftar Stimulus OJK di Bidang Pasar Modal

- Pembelian Kembali (Buyback) Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Berfluktuasi secara Signifikan**
 - Pembelian kembali (buyback) saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.
- Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal**
 - Perubahan batasan Auto Rejection dan penyesuaian mekanisme *Pro Opening* pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.
 - Penyesuaian oleh KPEI, atas nilai *haircut* dan perhitungan risiko (*risk charge*) dalam rangka perhitungan *collateral* dan MKBD bagi saham-saham LQ45, dalam rangka stimulus pasar.
 - Pelarangan *Transaksi Short Selling* bagi semua Anggota Bursa mulai 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.
 - Kebijakan bagi BEI untuk tidak melakukan *review* atas efek margin dalam Daftar Efek Margin (DEM) bulanan dan penggunaan DEM periode sebelumnya untuk penerbitan DEM berikutnya.
 - Pelaksanaan *trading halt* selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5%.
- Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala**
 - Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik serta laporan keuangan bagi *Self-Regulatory Organization (SRO)* diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan.
- Penyelenggaraan RUPS oleh Emiten dan Perusahaan Publik**
 - Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan.
 - Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian (KSEI).
- Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek**
 - Waktu perdagangan di Bursa Efek dari hari Senin - Jumat menjadi sesi I: jam 09.00 - 11.30 WIB dan sesi II: jam 13.30 - 15.00 WIB.
 - Waktu perdagangan SPPA menjadi jam 09.00 - 15.00 WIB.
 - Waktu operasional PLTE menjadi jam 09.30 - 15.30 WIB.

Sumber : OJK

Sedangkan relaksasi dan stimulus dalam rangka memelihara keberlangsungan industri pengelolaan investasi atau reksadana dari dampak pandemi di antaranya :

Pertama, ketentuan mengenai komposisi portofolio efek reksadana serta kewajiban penyesuaian komposisi portofolio reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ada dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 serta Nomor 33/POJK.04/2019 diatur sebagai berikut :

A. Kewajiban penyesuaian komposisi portofolio reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan manajer investasi disesuaikan menjadi paling lambat 20 hari bursa.

B. Kewajiban penyesuaian komposisi portofolio reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan manajer investasi disesuaikan menjadi paling lambat 40 hari bursa.

Kedua, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp10 miliar juga disesuaikan.

Penyesuaian itu yakni dalam jangka waktu 130 hari bursa setelah pernyataan pendaftaran reksadana menjadi efektif atau dalam jangka waktu 160 hari bursa bagi reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan dan reksadana indeks yang melakukan penawaran umum bersifat terbatas.

Ketiga, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan total nilai aktiva bersih (NAB) kurang dari Rp10 miliar disesuaikan menjadi 160 hari bursa berturut-turut.

Keempat, dalam hal portofolio efek berupa efek bersifat utang, termasuk efek beragun aset arus kas tetap sebagai basis proteksi reksadana terproteksi mengalami penurunan peringkat di luar kategori layak investasi, maka manajer investasi (MI) dapat meminta relaksasi jangka waktu pengganti portofolio efek kepada OJK.

Penggantian tersebut dengan ketentuan MI menyampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio efek yang menjadi basis proteksi dalam reksadana terproteksi. Selain itu, MI juga beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor untuk merumuskan langkah penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio efek yang menjadi basis proteksi dalam reksadana terproteksi.

Kelima, dalam rangka mempermudah pembelian reksadana bagi investor yang melakukan transaksi secara elektronik khususnya melalui agen daring, pembelian reksadana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran virtual account yang disediakan penyedia layanan payment gateway.

Agen penjual reksadana daring wajib memperoleh persetujuan dari OJK, memastikan virtual account tersebut atas nama masing-masing pemegang unit penyertaan reksadana, memastikan virtual account selalu berada pada zero balance, memiliki SOP dan manajemen risiko yang memadai dan memiliki perjanjian tertulis dengan pihak terkait.



JUARA 2

ARTIKEL JURNALISTIK

Adullah Fikri Ashri
Harian Kompas

Selamat Tinggal Bantal dan Celengan...

Di ruangan sederhana berdinding kayu seluas 5 meter persegi itu, warga Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengenal rekening tabungan.

Ruangan itu berada di sekretariat Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) Cakrabuana, di depan Sungai Pegagan Kidul, sekitar 18 kilometer (km) sebelah utara pusat Kota Cirebon.

"Dari sini, saya membuat rekening bank dan kartu anjungan tunai mandiri. Dulu, kalau mau kirim uang lewat saudara, pasti ada potongan, ucapan terima kasih, ha-ha-ha," ujar Carneti (45), warga setempat, malu-malu.

Carneti pernah menjadi buruh migran Indonesia di Timur Tengah pada 2017-2018. Saat itu, ia biasa mentransfer jutaan rupiah melalui Western Union kepada keluarganya di kampung. Ia dan suaminya tidak punya rekening bank. Saat itu ia berpikir memiliki rekening bank akan ribet. Untuk mencairkan uang harus pergi ke bank dengan beragam syarat. Namun, keinginan menyimpan uang tetap ada. Jalan keluarnya, dia menabung di celengan berbahan lempung karya perajin gerabah di Desa Sitiwinangun, Jombang, sekitar 16 km dari Pegagan Kidul.

"Kalau perlu uang, celengan dipecah. Nanti, beli celengan lagi di Kamisan (pasar malam Kamis)," kata lulusan sekolah menengah atas ini.

Carneti lupa sudah berapa kali ia memecahkan celengan tanah liat. Hubungannya dengan celengan lempung "putus" sejak Desa Pegagan Kidul menjadi program percontohan percepatan keuangan inklusif, November 2019.

Program Bank Dunia, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Jabar menggandeng KKBM Cakrabuana. Sebagai pengelola program, pengurus KKBM Cakrabuana mendatangi rumah warga untuk menyosialisasikan program tersebut.

Carneti dan warga desa lainnya mulai memahami fungsi produk dan layanan jasa perbankan, seperti rekening. Ia juga diajak memanfaatkan program tabungan emas PT Pegadaian (Persero).

Dengan angsuran minimal Rp 8.000 per pekan. Carneti menabung emas. Kadang kala ia menyetor Rp 10.000, Rp 20.000, bahkan Rp 50.000 per pekan. Setelah enam bulan, pemilik warung kecil itu punya emas 2 gram. "Saya mau menabung sebanyak-banyaknya. Harga emas lagi mahal, lebih dari Rp 900.000 per gram," katanya.

Ia juga mengembangkan usaha lewat kredit usaha rakyat supermikro sebesar Rp 5 juta. Hasil warung itu membantu kondisi ekonomi rumahnya di tengah pandemi Covid-19. Suaminya bekerja serabutan, sedangkan anak-anaknya kuliah dan duduk di bangku SMA sehingga perlu biaya.

Untuk mengembalikan pinjaman, Carneti mencicil Rp 252.000 per bulan selama 21 bulan. Baginya, nilai cicilan itu tidak memberatkan, berbeda dengan pemberi pinjaman yang kerap kali menawarkan pinjaman bagi warga desa dan mengenakan bunga mencekik leher.

Carneti, salah seorang warga, merasakan manfaat inklusi keuangan, bisa

diartikan kondisi masyarakat yang mengakses produk dan jasa keuangan formal.

Bintun, Koordinator KKBM Cakrabuana, mengatakan, sebelum program itu berjalan, hanya 40 persen dari sekitar 3.000 rumah tangga di wilayah itu yang memiliki rekening. "Masih banyak warga yang menaruh uang di bawah bantal karena merasa lebih aman. Padahal, jeblos juga diambil anak-anaknya," kata Bintun diiringi tawa.

Melalui program inklusi keuangan, muncul enam agen perbankan di desa, termasuk KKBM Cakrabuana yang menjalankan tabungan emas Pegadaian. Warga tidak lagi perlu ke kantor cabang bank atau ATM. Cukup datang ke agen, nasabah bisa tarik uang, transfer, dan mengangsur kredit. "Sekarang, lebih dari 60 persen rumah tangga di sini sudah punya rekening. Sekitar 80 warga ikut tabungan emas. Perwakilan Bank Dunia masih biasa menelepon warga untuk survei," katanya. Sebanyak 12 toko, lanjut dia, juga dapat melayani pembayaran nontunai dengan aplikasi.

Esih Sunarsih, Kepala Urusan Keuangan Desa Pegagan Kidul, menilai program inklusi keuangan relevan dengan pandemi Covid-19 ini. Warga, misalnya, tak lagi harus berkerumun di kantor cabang bank dekat Pasar Celancang. "Cukup ke agen saja kalau mau kirim uang," katanya.

Cukup Rp 100.000

Di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, 259 warganya menjadi investor saham. Pada 2018, desa itu ditetapkan sebagai Desa Nabung Saham. Kini, warga di desa-desa sekitar Sidorejo juga jadi investor saham di Galeri Investasi di desa itu.

"Semula, saya kira perlu jutaan rupiah untuk membuka rekening tabungan saham. Ternyata modal untuk investasi saham hanya Rp 100.000," ujar Agus Fauzi (35), warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan.

Agus tahu informasi tentang Desa Nabung Saham dari media sosial Facebook pada Januari 2019. Ia tertarik belajar saham dan berkunjung ke rumah Riyan Ahmad, inisiator desa menabung saham Desa Sidorejo. Setelah berdiskusi dan mengikuti beberapa kali kelas belajar saham, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ini yakin membuka tabungan saham dengan modal awal Rp 100.000.

"Investasi saham untuk jangka panjang. Saya berharap hasil investasinya bisa dimanfaatkan saat pensiun," ujarnya.

Sejak belajar investasi, literasi keuangan semakin baik. Dia tak hanya makin giat menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan, tetapi juga memiliki perencanaan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Lampung Bambang Hermanto mengatakan, selain Sidorejo, Desa Titiwangi di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, juga menjadi desa inklusi keuangan. Saat ini nilai transaksi investasi saham di dua desa itu lebih dari Rp 800 juta dari 429 nasabah.

Banyak cara untuk mengenal produk jasa keuangan. Lalu, warga meninggalkan celengan dan bantal....



JUARA 3 ARTIKEL JURNALISTIK

Fajar Yusuf Rasdianto
Alinea.id

Menjaga Marwah OJK di Tengah Terpaan Kontroversi dan Pandemi

OJK menunjukkan dokumen untuk menampik semua tuduhan yang tertuju pada lembaganya.

Puluhan tahun silam, tepatnya tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah berdiskusi tentang kemungkinan adanya satu otoritas baru pengawas perbankan di luar struktur Bank Indonesia (BI). Ketika itu, usulannya masih merujuk pada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK).

Pertimbangan ini muncul menyusul kekecewaan pemerintah terhadap kinerja BI dalam urusan pengawasan perbankan pascareformasi 1998. Lemahnya pengawasan BI kala itu mengakibatkan lahirnya satu prahara besar yang dikenal sebagai skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun lebih.

Atas alasan itu, lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU-BI). Pasal 35 beleid tersebut menyebutkan, tugas pengawasan perbankan kelak akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen, paling lambat 31 Desember 2002.

Namun dalam perjalanannya, pembahasan terkait pembentukan otoritas baru itu terus menuai kontroversi. Pasal 34 UU Bank Indonesia bahkan harus direvisi berkali-kali sehingga lahir satu aturan baru, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 1999.

Dalam revisi undang-undang (RUU) itu disebutkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal ditunda dan baru akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah termasuk pihak yang tidak setuju atas didirikannya OJK kala itu.

Pada sebuah diskusi daring bersama sejumlah tokoh ekonomi berpengaruh di Indonesia, Burhan mengatakan dirinya tidak sepakat jika pemerintah memaksakan pembentukan OJK di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. "Pertanyaan saya pada waktu itu adalah apakah memang harus sekarang LPJK itu dibentuk? Kita ini dalam keadaan krisis, kita memerlukan untuk menata berbagai hal dalam struktur perekonomian kita, sementara kita mau memisahkan diri. Apakah ini bagian dari upaya dari krisis? Kalau bukan bagian dari upaya menghadapi krisis, bisa kita tunda," tutur mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 ini, Senin (6/7).

Sah. Pembentukan OJK pun ditunda. Tetapi pada 2008, bau anyir soal lemahnya pengawasan BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kembali terendus.

Kasus-kasus di sektor keuangan pun bermunculan, sebut saja skandal Bank Century yang merugikan negara Rp7,44 triliun. Kemudian, kasus-kasus lainnya seperti kasus Melinda Dee atau City Bank dengan kerugian Rp131 miliar, Bank Mega sebesar Rp111 miliar, tower Bank Jabar Banten (BJB) Rp540 miliar, PT Antaboga Sekuritas, dan PT Askrindo memunculkan kembali wacana pembentukan OJK.

Andi Rahmat, Mantan Wakil Ketua Pansus OJK DPR menilai, nuansa kecarut-marutan ekonomi pada masa itu menjadi salah satu pemicu wacana pembentukan OJK kembali muncul ke permukaan. Menurut Andi, saat itu banyak sekali masalah perbankan dan lembaga keuangan yang timbul lantaran lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan BI. "Sebagiannya memang merupakan hasil dari peraturan di BI yang memang kita bahas waktu itu tidak lagi berkesesuaian dengan perkembangan. Tapi sebagiannya memang merupakan problem yang bersifat kelembagaan," ungkap Andi dalam diskusi daring bersama Narasi Institute, (6/7).

Walhasil, setelah pembahasan yang cukup panjang, disahkanlah UU Nomor 21 tentang OJK pada Desember 2012. Dalam keputusan ini, fungsi dan tugas OJK ditetapkan sebagai pengawas independen terhadap seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Satu per satu tugas BI dan Bapepam-LK pun dialihkan ke OJK. Tugas dan fungsi terakhir yang dialihkan adalah pengawasan perbankan. Pada awal 2013, OJK resmi beroperasi.

Wacana pembubaran

Sayangnya baru setahun berdiri, OJK kembali diselimuti kontroversi. Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa menilai pembentukan OJK inkonstitusional dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Mereka mengajukan uji materi UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menuntut agar OJK dibubarkan. Tetapi pada Agustus 2015, MK memutuskan untuk menolak tuntutan pemohon. Hasilnya, OJK selamat dari pembubaran.

Namun selang enam tahun kemudian, wacana pembubaran OJK kembali santer terdengar. Hal ini buntut dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk produk Jiwasraya Saving Plan. Selain itu, adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 7 bank bermasalah selama periode 2019 ditengarai makin mendorong wacana pembubaran otoritas ini.

Wacana pembubaran ini kembali berembus pada Januari 2020, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk membenahi pengaturan dan pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan nonbank. Mantan Wali Kota Solo itu membuka peluang untuk merevisi UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang dianggapnya sudah tidak lagi relevan. "Ini momentum untuk mereformasi industri keuangan nonbank, baik asuransi maupun dana pensiun sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat. Bisa saja UU OJK juga direvisi karena dibentuk sejak 2012," ungkap Jokowi, (17/1).

Pernyataan ini kemudian direspons Komisi XI DPR RI dengan menyebut kemungkinan adanya pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari OJK kepada BI. 'Kecolongan' OJK dalam kasus gagal bayar Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun menjadi pemicu utamanya.

"Memungkinkan saja OJK dikembalikan ke BI. Di Inggris sudah terjadi, beberapa negara juga sudah terjadi. Nah ini tentu (peran OJK) harus dievaluasi," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR RI Eriko Sutarduga, pada 21 Januari lalu.

Setelah sempat meredup, wacana pembubaran OJK ini pun kembali

menyeruak pada awal Juli lalu. Kantor berita Reuters pada Kamis (2/7) mengabarkan soal kekecewaan Jokowi terhadap kinerja OJK semasa pandemi.

Persoalan restrukturisasi kredit yang masih minim, dan sejumlah kasus lain yang melibatkan perbankan Tanah Air menjadi pemicu utama atas kekecewaan itu. Buntutnya, Jokowi dikabarkan ingin fungsi pengawasan perbankan dikembalikan kepada BI.

Komisi XI DPR RI pun lagi-lagi merespons pernyataan itu dengan serius. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto bahkan mengancam dengan rencana penggantian kepemimpinan di tubuh OJK. Salah satu persoalan ini juga dipicu dengan ditetapkannya Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya.

"Ada masalah leadership (kepemimpinan), leadership yang mungkin kami perlu kaji ulang, tidak apa-apalah sudah. Kalau perlu kami kock ulung kalau memang masih seperti ini, karena banyak sangat terdampak dengan situasi saat ini, mereka seharusnya kerja extraordinary di masa seperti ini," ucap Dito dinukil Antara, (7/7).

Dokumen rahasia borok lama

Menyikapi desas-desus itu, Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengaku pihaknya kini hanya ingin fokus membantu Indonesia keluar dari tekanan krisis semasa pandemi. Namun begitu, ia juga ingin publik menilai secara adil dan proporsional dalam setiap kasus yang belakangan semakin menunjuk ke 'hidung' OJK.

Dalam kasus Jiwasraya misalnya, Anto menyebut bahwa skandal asuransi jiwa pelat merah ini sudah bergulir sejak 2006. Jauh sebelum produk asuransi plus investasi, Jiwasraya Saving Plan diluncurkan pada 2013. Saat itu, kata ia, pengawasan lembaga asuransi dan pasar modal masih di bawah Bapepam-LK yang masuk dalam struktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Untuk membuktikannya, Anto menunjukkan dokumen rahasia Jiwasraya yang ada di tangan OJK kepada Alinea.id. Dokumen itu didominasi warna merah dengan judul 'Koronologis Jiwasraya' dan keterangan 'Rahasia' di bawah judulnya.

Keterangan awal dalam dokumen itu menunjukkan laporan keuangan Jiwasraya pada 2006 dengan ekuitas negatif Rp3,29 triliun dibandingkan aset yang dimiliki perseroan. Defisit kemudian menjadi semakin lebar ketika pada 2008 dan 2009 laporan keuangan Jiwasraya kembali negatif dengan nilai Rp5,7 triliun dan Rp6,3 triliun secara berturut-turut.

Lantas pada 2013, OJK pun merekomendasikan suntikan dana pemerintah agar perusahaan ini tetap hidup. Namun sayang, rekomendasi itu justru dijawab pemerintah dengan menggelar reevaluasi aset untuk kembali merapikan laporan keuangan Jiwasraya.

"Laporan keuangannya rapi lagi, bos. Karena kalau laporan keuangannya enggak rapi, dia enggak bisa jualan," tutur Anto saat berbincang dengan Alinea.id di kantornya, (8/7).

Terkait kasus ini, Anto mengaku bukan bermaksud untuk melimpahkan kesalahan pada pihak lain. Bahwa OJK masih memiliki kekurangan dari beberapa sisi, memang benar. Tetapi untuk menunjuk kesalahan hanya kepada OJK dalam persoalan Jiwasraya, itu dinilainya tidak cukup adil.

Pasalnya, kasus Jiwasraya sejatinya sudah bergulir sebelum OJK resmi beroperasi. Banyak pihak dalam kasus ini yang mestinya juga turut bertanggung jawab.

"Setiap perusahaan dia punya pengawas, namanya dewan komisaris, dewan komisaris ini wakil siapa? Wakil pemerintah. Artinya, pemerintah tahu persis bagaimana mengelola perusahaan ini," terangnya.

Sementara terkait tudingan soal 7 bank bermasalah yang dikeluarkan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019, Anto mengaku bahwa pihaknya sudah memenuhi seluruh persyaratan yang direkomendasikan BPK.

Dalam laporan ini, OJK dianggap lalai dalam fungsi pengawasan terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Yudha Bakti, PT Bank Mayapada Internasional Tbk., PT BPD Papua, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT BPD Banten Tbk., dan PT Bank Bukopin.

“Kami sudah penuh semua,” katanya.

Alinea.id lantas mengonfirmasi persoalan ini kepada Ketua BPK Agung Firman. Melalui sebuah pesan singkat, Agung menyebut, bahwa seluruh rekomendasi BPK dalam IHPS II itu sudah ditindaklanjuti oleh OJK.

Namun demikian, Agung tetap memberi catatan khusus kepada OJK agar lembaga pengawasan itu bisa semakin prudent dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin kompleks dewasa ini.

“Dalam ekonomi dan sistem keuangan dan pelaku yang semakin banyak dan bervariasi, maka kompleksitas itu perlu direspons dengan pengawasan secara khusus oleh institusi yang secara khusus menangani lembaga/jasa keuangan,” terang Agung (8/7).

Di sisi lain, soal tudingan lambannya kinerja OJK dalam masa pandemi, Anto membantahnya dengan menunjukkan data kinerja OJK selama semester I 2020. Data itu menunjukkan progres restrukturisasi kredit yang dinilai sebagai salah satu alasan kekecewaan Jokowi kepada OJK.

Dokumen sepanjang 16 halaman ini membuktikan bahwa realisasi restrukturisasi kredit yang dilakukan OJK sejak masa awal pandemi sudah berjalan sesuai harapan. Per 29 Juni 2020, realisasi restrukturisasi kredit perbankan tercatat mencapai Rp740,79 triliun dengan total 6,56 juta debitur.

“UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Non-UKMM. UMKM-nya 5,9 juta, NON-UMKM sisanya,” beber Anto.

Pro-kontra pembubaran

Terlepas dari itu, rupanya wacana pengembalian fungsi pengawasan OJK kepada BI tidak langsung menguap begitu saja. Isu ini malah semakin santer ketika banyak pihak mulai berkaca dari kasus kegagalan Financial Service Authority (FSA), lembaga serupa OJK di Inggris yang akhirnya kembali dilebur fungsinya ke Bank of England (BoE) pada 2008.

Pembubaran FSA itu dipicu oleh kejatuhan tiga bank berdampak sistemik di Inggris lantaran terlibat kasus subprime mortgage yang menjadi biang keladi krisis 2008. Di depan parlemen, Menteri Keuangan Inggris George Osborne bahkan sampai menyebut bahwa FSA merupakan kegagalan terbesar Negeri Ratu Elisabeth itu dalam mengelola sistem keuangan.

“Sekarang, orang-orang Inggris bertanya, bagaimana pemerintah koalisi belajar dari kesalahan-kesalahan itu,” ujar Osborne pada 2010 silam.

Tetapi untuk menilai keberhasilan lembaga pengawas independen, tidak adil rasanya jika Indonesia hanya melihat pada kegagalan Inggris saja. Pasalnya, jika berkaca pada negara lain seperti di Jepang, keberadaan FSA justru bisa memberikan dampak baik bagi perekonomian negara.

Meski semenjak keberadaannya, Jepang tidak lepas dari sejumlah masalah keuangan, tetapi kehadiran FSA terbukti telah memberikan kontribusi signifikan pada stabilitas sistem keuangan di negaranya. Kunci keberhasilan FSA di Jepang ini berkaitan erat dengan koordinasi ciamik yang dilakukan FSA dan Bank of Japan (BoJ) dalam berbagi informasi terkait kondisi lembaga keuangan.

Karena itu, sejumlah pengamat pun menilai bahwa pembubaran OJK atau pengembalian fungsi pengawasan lembaga keuangan ke BI sebagai keputusan yang kurang tepat dan justru bakal berdampak lebih parah pada ekonomi.

Burhanuddin Abdullah menceritakan saat pembahasan kelahiran OJK, aset industri perbankan berkisar Rp4.000 triliun. Kini, aset industri ini meningkat hingga Rp6.000 triliun. Karena itulah, keberadaan OJK masih dianggap penting dalam mengawasi sektor perbankan ini.

“Saya enggak setuju kalau OJK dibubarkan. Saya setuju kalau OJK di re-arrange dengan bank OJK. Misalnya OJK tetap sebagai otoritas tetapi under oversees of Bank Indonesia. OJK punya direksi sendiri tapi di dalam BI,” usulnya.

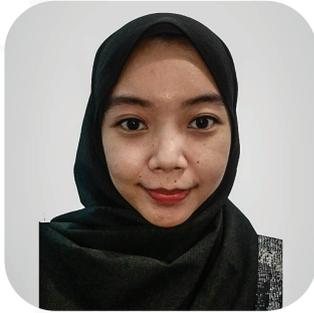
Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai yang harus diperbaiki sekarang bukanlah kinerja OJK, melainkan justru sistem koordinasi antara lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Seperti diketahui, OJK tergabung dalam KSSK bersama dengan BI, Kemenkeu, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kita sekarang ini harus lebih fokus kepada penyelesaian masalah. Ada (masalah) bank-bank yang harus kita selesaikan, karena ini berbahaya, di mana ketika kondisi ini kepercayaan masyarakat itu bisa menggulirkan kepada bank-bank lain. Nah ini yang menurut saya harus dijaga,” tutur Aviliani beberapa waktu lalu.

Hal senada juga disampaikan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Meski ia mengakui bahwa ada ‘borok’ yang terbuka lebar dalam struktur kepemimpinan di OJK, namun melempar isu kontroversial pembubaran OJK di waktu pandemi merupakan sikap yang kurang tepat.

Pasalnya, isu tersebut justru akan berdampak pada semakin menurunnya tingkat kepercayaan investor pada sistem keuangan Tanah Air. Ujungnya, justru bakal membuat kondisi perekonomian nasional semakin sulit.

“Memang ada masalah di internal OJK. Tapi apakah dengan ide menghilangkan OJK atau menggabungkan OJK dengan BI menjadi solusi? Saya pikir, mungkin bukan solusi saat ini. Tapi memperbaiki OJK betul-betul adalah agenda utama,” pungkas Didu.



HARAPAN

ARTIKEL JURNALISTIK

Nida Sahara
Investor Daily

Mengawasi Gurita Konglomerasi Keuangan

Tentakel bisnis keuangan semakin merajalela di berbagai sektor, akibat perkembangan globalisasi, teknologi, dan inovasi produk. Ketika sisi buruk dari konglomerasi terjadi, maka menyebabkan peningkatan eksposur risiko, khususnya gurita bisnis keuangan yang memiliki kegiatan lebih dari satu jenis sektor dan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, dalam pasar yang didominasi oleh konglomerasi, pengawasan mutlak dilakukan secara terintegrasi dalam rangka mempermudah deteksi risiko sistemik untuk langkah antisipasinya. Pengawasan bank menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dari tentakel bisnis bank sebagai induk usaha apabila terjadi masalah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai wasit lembaga jasa keuangan (LJK) memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di sektor keuangan. Melihat sepek terjang konglomerasi keuangan yang semakin menggurita, salah satu fokus OJK adalah mengawasi konglomerasi secara terintegrasi untuk memastikan semua risiko bisa teridentifikasi lebih dini.

Kondisi sektor jasa keuangan yang sehat dan aman merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Aktivitas LJK telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan dalam suatu konglomerasi keuangan.

Tak dapat dipungkiri, sejak didirikan, OJK telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengawasan terintegrasi. Misalnya, dengan menerapkan pengawasan secara terpusat melalui penunjukan entitas utama dan mewajibkan penerapan manajemen risiko dan laporan bank secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Walaupun belum maksimal, tapi regulator terus berbenah, hingga kembali menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang diteken pada 14 Oktober 2020. Kriteria konglomerasi keuangan memiliki total aset grup lebih besar atau sama dengan Rp 100 triliun.

“Saat ini kami punya definisi yang lebih jelas, secara total ada 45 konglomerasi keuangan. Pengaturan ini kami buat agar bisa melihat satu per satu lebih detail,” tutur Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (27/10).

Konglomerasi keuangan menurut OJK merupakan LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan yang usahanya meliputi bank, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan efek. Bahkan, beberapa konglomerasi keuangan memiliki bisnis di luar sektor keuangan.

“Kami akan terus monitor, apalagi konglomerasi keuangan yang punya kegiatan lain di luar sektor keuangan. Jadi, kalau ada hal yang bisa potensial mengganggu sektor keuangan, bisa kami lihat lebih dini,” sambung Wimboh.

Kewajiban Entitas Utama

Merujuk POJK 45, entitas utama wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi yang memuat tujuan, dasar penyusunan, ruang lingkup, struktur konglomerasi, tugas dan tanggung jawab, dan lainnya yang disampaikan ke OJK paling lambat 31 Desember 2020 untuk pertama kali, sedangkan anak usaha di dalam konglomerasi menyampaikan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan pelaporan entitas utama. Bila melewati ketentuan, OJK menyiapkan sanksi administratif berupa denda Rp 1 juta per hari dan paling banyak Rp 30 juta.

Salah satu alasan beleid tersebut ditelurkan karena masukan dari Technical Assistance IMF dan World Bank, yang menjelaskan bahwa OJK perlu melakukan peninjauan ulang terhadap definisi konglomerasi keuangan yang berlaku saat ini, dengan mempertimbangkan aspek materialitas konglomerasi

keuangan dan pemberlakuan threshold berdasarkan kriteria tertentu.

Dari segi bisnis, konglomerasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, pemasaran, sinergi distribusi, dan diversifikasi produk/jasa, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan grup. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konektivitas, skala dan ukuran grup konglomerasi keuangan yang besar berpotensi meningkatkan risiko sistemik.

“Berkembangnya produk dan layanan transaksi keuangan yang semakin borderless serta memiliki keterkaitan yang tinggi antar sektoral produk perbankan, pasar modal, dan IKNB, menekankan semakin dibutuhkannya pengawasan terintegrasi, dalam rangka menjaga stabilitas keuangan serta melindungi konsumen keuangan terutama di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Wimboh.

Penguatan pengawasan konglomerasi tidak dimaksudkan untuk menahan usaha ekspansi bisnis LJK. Sebaliknya, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko melalui pengawasan yang terintegrasi akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepastian berinvestasi sehingga mempermudah usaha pendalaman pasar keuangan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, celah pengawasan mengakibatkan kasus lintas subsektor keuangan terlambat terdeteksi dan baru ditangani setelah membesarnya kerugian investor dan nasabah LJK.

Direktur Riset Center of Reforms on Economic (CORE) Piter Abdullah bilang, pengawasan industri jasa keuangan tidak bisa dipisah-pisah. Oleh karenanya sejak OJK terbentuk, visi utama yang tertanam ialah melakukan pengawasan terintegrasi.

“Pengawasan terintegrasi, pada saat membentuk OJK, itulah yang akan menjadi pekerjaan utama OJK, yang tidak bisa dilakukan apabila pengawasan terpisah-pisah, ada yang di bawah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI). Nah, ini yang ingin kita perbaiki saat membentuk OJK,” imbuh Piter.

Dengan dilakukannya pengawasan terintegrasi, maka diharapkan seluruh konglomerasi keuangan dapat bersinergi, tumbuh dan berkembang. Sehingga pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan nasional secara khusus dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara umum.

Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto juga mengungkapkan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dari UU tersebut, dikeluarkan sejumlah POJK, antara lain POJK 17/2014 tentang manajemen risiko terintegrasi, POJK 18/2014 tentang tata kelola terintegrasi, serta POJK 26/2015 tentang permodalan terintegrasi.

“Pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi oleh OJK dilakukan secara intensif dan komprehensif, termasuk pada level produk keuangan. Sehingga bisa diambil langkah-langkah pre-emptive oleh OJK,” ujar Ryan.

Enam Alasan

Ryan menjelaskan, terdapat enam alasan urgensi pengawasan konglomerasi keuangan, antara lain pertama, peran nyata sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional, kedua, peran signifikan konglomerasi keuangan di Indonesia yang semakin besar. Ketiga, konglomerasi keuangan cenderung melakukan excessive risk taking produk.

Keempat, produk atau layanan LJK dari konglomerasi terjadi lintas sektor menjadi sangat kompleks dan dinamis meningkatkan eksposur risiko. Kelima, sumber kerentanan krisis pada sektor keuangan menjadi sangat beragam. Keenam, mencegah timbulnya risiko sistemik dalam sektor keuangan.

Adapun, terdapat 10 cakupan risiko dalam konglomerasi keuangan, yakni risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, risiko reputasi, risiko strategis, kepatuhan, transaksi intra grup, serta risiko asuransi. Pengawasan konglomerasi keuangan merupakan suatu kerangka suplementer atau tambahan terhadap kerangka pengawasan sektoral yang ada.

Sebagai kerangka pengawasan suplementer, prinsip dari sistem pengawasan konglomerasi ditujukan untuk memitigasi kompleksitas dari risiko interaksi maupun celah yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan lintas sektor dari institusi yang tergabung dalam struktur konglomerasi.

Ryan menilai, pengawasan terintegrasi atau konglomerasi keuangan lebih baik dilakukan oleh satu lembaga yang sama, supaya pengawasan bisa lebih efektif dan optimal.

“Dengan semakin mengguritanya konglomerasi membuat potensi risiko lebih kompleks, dari situ nyata pengawasan jasa keuangan terintegrasi dilakukan oleh lembaga yang sama, supaya pengambilan keputusan dengan cepat,” ungkap Ryan.

Semakin Kompleks

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ahmad Siddik Badruddin sebelumnya menyampaikan, pengawasan perbankan saat ini lebih kompleks, karena integrasi keuangan yang semakin besar, adanya konglomerasi sektor keuangan memerlukan pengawasan dari regulator untuk mencegah risiko yang terjadi pada sektor keuangan bahkan kepada perekonomian nasional.

“Ke depan bagaimana kita bersama stakeholder terutama regulator, meng-upgrade monitoring evaluasi risiko dari grup konglomerasi keuangan,” ucap Siddik.

Dia mengatakan, memang OJK sudah memiliki peraturan yang mengawasi konglomerasi, namun masih perlu diperbaharui untuk mencegah risiko yang terjadi supaya cepat terdeteksi. Sehingga masalah yang dihadapi dari anggota konglomerasi tidak berdampak pada anggota konglomerasinya yang lain. “Saat ini ada POJK yang memonitor risiko konglomerasi, tapi masih ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan agar konglomerasi yang tumbuh cepat dan makin banyak perusahaannya bisa ketahuan jika ada masalah,” ungkap Siddik.

Siddik menyebutkan, terdapat 48 konglomerasi keuangan per Desember 2018 menguasai Rp 6.930 triliun aset jasa keuangan atau 66% dari total aset jasa keuangan di Indonesia senilai Rp 10.539 triliun. “Sebanyak 34 adalah konglomerasi dari industri perbankan, per Desember 2018, menguasai Rp 6.743 triliun aset jasa keuangan, atau 84% dari total aset perbankan Rp 8.068 triliun,” tutur Siddik.

Dari empat bank terbesar di Indonesia, lanjut dia, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA memiliki anak usaha yang terus bertambah. Kemudian, untuk IKNB terdapat 11 konglomerasi, serta ada 3 konglomerasi dari pasar modal.

“Kalau ada rencana penyesuaian regulasi industri jasa keuangan, ini salah satu bagiannya industri perbankan, asuransi, capital market yang satu grup, bagaimana framework polanya efektif. Pengawasan grup-grup ini supaya kalau ada inherent risk di salah satu konglomerasi yang berdampak ke industri jasa keuangan lainnya bisa segera teridentifikasi,” pungkas Siddik.

OJK memiliki Komite Pengawas Terintegrasi yang beranggotakan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB untuk berbagai kebijakan pengawasan dan kebijakan strategis keuangan terutama yang bersifat lintas sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki unit Perizinan dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang bertugas untuk memproses perizinan lintas sektoral dan memformulasikan kebijakan yang bersifat lintas sektoral.

Penataan konglomerasi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap gurita konglomerasi keuangan yang sesuai dengan praktik-praktik terbaik secara internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan serta Piagam Korporasi (Corporate Charter) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini.



HARAPAN

ARTIKEL JURNALISTIK

Farid Nurfazri Firdaus
Investor Daily

OJK Siapkan Market Maker di Bursa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan market maker di bursa untuk meningkatkan likuiditas perdagangan dan mempersempit praktik pembentukan harga saham secara semu, sehingga pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel. Aturan market maker ditargetkan rampung pada semester II-2020.

Market maker adalah pihak yang ditunjuk bursa untuk menyediakan kuota bid dan offer dalam jumlah yang memadai. Market maker akan bertindak sebagai pembeli dan penjual siaga (standby buyer and seller) untuk saham perusahaan yang akan ditentukan otoritas bursa.

“Ke depan, kami menekankan pentingnya market maker untuk meningkatkan likuiditas perdagangan dan mempersempit celah untuk ‘menggoreng’ saham, sehingga pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel,” tegas Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso pada perayaan HUT Ke-43 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (10/8).

Menurut Wimboh, OJK menargetkan jumlah investor di pasar modal hingga akhir 2020 menyentuh 3,4 juta single investor identification (SID). Untuk mencapai target tersebut, OJK tengah menyiapkan berbagai kebijakan guna memperkuat pasar modal domestik dan meningkatkan perlindungan terhadap investor.

OJK mengapresiasi keberhasilan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan self-regulatory organization (SRO) lainnya –PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)– dalam meningkatkan jumlah investor di pasar modal, termasuk selama pandemi Covid-19. Saat ini, terdapat 3,02 juta SID.

Peran investor domestik terus meningkat, bahkan jumlah investor domestik selama pandemi terus bertumbuh. Kami seluruh Dewan Komisiner OJK mengapresiasi kinerja yang luar biasa ini,” tutur dia.

Wimboh menjelaskan, untuk memberikan proteksi kepada investor maupun calon investor, OJK terus meningkatkan kesadaran (awareness) investor terhadap kualitas saham emiten yang ditransaksikan. Untuk itu, menurut dia, OJK dan SRO bersiap mengembangkan papan khusus guna mengakomodasi perpindahan saham papan atas yang mengalami penurunan kelas dan perlu mendapatkan pengawasan otoritas.

Di BEI saat ini terdapat tiga papan emiten, yaitu papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. “Ini sebagai salahsatu upaya untuk melengkapi kebijakan notasi khusus,” ujar dia.

Notasi khusus disematkan otoritas bursa kepada saham emiten yang mendapatkan perhatian khusus. Saat ini terdapat tujuh notasi khusus yang ditorehkan otoritas bursa kepada emiten bermasalah, yaitu notasi B (permohonan pernyataan pailit), notasi M (permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang/ PKPU), dan notasi E (laporan keuangan

terakhir menunjukkan ekuitas negatif).

Lainnya adalah notasi S (laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha), notasi A (opini tidak wajar atau adverse dari akuntan publik), notasi D (opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik), dan notasi L (belum menyampaikan laporan keuangan).

Ketua OJK berharap percepatan reformasi di pasar modal mampu membangun ekosistem pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. “Reformasi ini juga diharapkan bisa melindungi investor serta membangun kepercayaan investor dan pelaku industri terhadap pasar modal Indonesia,” tandas dia.

Wimboh menjelaskan, OJK bersama para pemangku kepentingan terus merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita menjadikan pasar modal Indonesia yang kuat.

“Kami berharap pasar modal berperan signifikan dalam menyediakan pembiayaan bagi pemerintah maupun dunia usaha untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” papar dia.

Wimboh Santoso menambahkan, perumusan kebijakan yang disiapkan OJK juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan menitikberatkan kebijakan yang mampu menstimulus perekonomian pada era new normal.

Berdasarkan catatan Investor Daily, isu pembentukan harga secara tidak wajar atau semu di bursa dan praktik cornering atau ‘goreng-menggoreng’ saham pernah disoroti Presiden Jokowi.

Pembentukan harga saham secara semu dilarang UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 92 UU Pasar Modal menyatakan, setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

20 Ribu Per Bulan

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/Anggota Dewan Komisiner OJK, Hoesen mengemukakan, jumlah investor yang kini mencapai 3,02 juta SID, atau naik tiga dalam tiga tahun terakhir merupakan pencapaian yang di luar ekspektasi.

Menurut Hoesen, penambahan investor selama Juli 2020 saja, yang masih dalam situasi pandemi, mencapai 20 ribu per bulan. Jumlah itu lebih tinggi dibanding kondisi normal.

“Saat ini, OJK melakukan kalibrasi sejumlah target dengan menyesuaikan

perkembangan situasi terakhir. Target investor yang lebih dari 3 juta sebenarnya sudah tercapai. Harapan kami, mudah-mudahan bisa sekitar 3,3 atau 3,4 juta investor sampai akhir 2020,” tutur dia.

Data OJK menyebutkan, dari total jumlah SID saat ini, 2,3 juta di antaranya merupakan investor reksa dana. Pesatnya pertumbuhan reksa dana terjadi karena produk tersebut memiliki jaringan distribusi yang luas, mulai manajer investasi (MI), anggota bursa, hingga agen khusus penjual reksa dana, dengan dukungan perkembangan teknologi sektor keuangan.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama KSEI, Uriep Budhi Prasetyo mengatakan, pihaknya meyakini salah satu faktor yang membuat pertumbuhan jumlah investor adalah kemudahan pembukaan rekening di KSEI. Proses pengenalan nasabah secara elektronik (know your customer/ e-KYC) menjadikan proses pembukaan rekening memakan waktu lebih cepat. Dalam pendaftaran rekening, sudah 14 perusahaan efek yang bisa diverifikasi, di mana KSEI bertindak sebagai administrator e-KYC.

Uriep menambahkan, investor yang mendominasi saat ini adalah kelompok usia di bawah 30 tahun, dengan porsi 46,14% dari jumlah total investor. Jika kelompoknya diperbesar lagi, yakni usia investor di bawah 40 tahun maka persinya mendominasi 70,77%. Sedangkan dari segi kelamin, investor laki-laki menguasai 60% dari total investor.

“Dari segi penyebaran investor paling banyak masih di Pulau Jawa. Namun, persentasenya secara perlahan mulai berkurang. Ini berarti ada pertumbuhan investor di pulau-pulau yang lain,” tandas dia.

Apresiasi Presiden

Secara virtual, Presiden Jokowi turut menyampaikan apresiasinya kepada BEI yang hingga kini mampu menjaring 35 perusahaan baru lewat aksi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham, bahkan selama pandemi Covid-19.

Apresiasi lainnya juga diutarakan presiden terhadap pertumbuhan jumlah investor. Kinerja BEI menepiskan kekhawatiran Jokowi perihal kemampuan pasar modal bertahan di tengah krisis.

“Kekhawatiran ini beralasan karena pandemi menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan terhadap aktivitas investasi. Dan kekhawatiran saya ini tidak terjadi karena pasar modal dengan sigap mengeluarkan kebijakan dan melakukan penyesuaian,” kata Jokowi.

Di sisi lain, Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi mengungkapkan, serangkaian program strategis diluncurkan otoritas bursa untuk mengembangkan pasar modal Indonesia. Program baru tersebut di antaranya sistem penawaran umum elektronik atau e-IPO, indeks IDX Quality 30, IDX virtual trading, e-proxy, dan roadmap pengembangan pasar modal syariah.

“Ke depan, pasar modal akan selalu berupaya memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder pasar modal, untuk memastikan pasar modal domestik terus berkembang di tengah pandemi Covid-19,” kata dia.

Inarno Djajadi berharap sistem e-IPO mampu membantu proses IPO saham menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan melalui pendekatan sistem. Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi di pasar perdana, dari tahap pembentukan harga sampai penawaran umum.

“Sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses penawaran umum dan harga IPO yang telah ditetapkan,” ucap dia.

Produk Baru BEI

Inarno menambahkan, dengan adanya e-IPO, investor yang ingin membeli saham IPO dapat langsung mengakses situs <https://www.e-ipo.co.id> atau melalui partisipasi sistem e-IPO yang telah terdaftar. Alhasil, investor dapat berpartisipasi dengan mudah dalam seluruh penawaran umum.

Dalam kesempatan tersebut, BEI juga meluncurkan indeks baru, yakni Indeks IDX Quality30 yang merupakan indeks saham berbasis faktor kualitas fundamental perusahaan. Indeks IDX Quality30 diharapkan dapat digunakan investor sebagai panduan untuk berinvestasi dan sebagai acuan bagi penyusunan produk-produk pasar modal lainnya, seperti reksa dana, exchange traded fund (ETF), serta produk-produk derivatif lainnya.

Inarno Djajadi mengungkapkan, untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di pasar modal, BEI pun meluncurkan IDX Virtual Trading, yaitu perangkat dan alat simulasi trading sebagai sarana edukasi yang dapat digunakan calon investor sebelum menjadi investor, serta meningkatkan jumlah investor di pasar modal yang merata di semua wilayah di Indonesia.

Menurut Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI, Fithri Hadi, aplikasi itu dibuat agar investor ritel pemula yang akan berinvestasi di pasar modal dapat mengasah keterampilan sebelum bertransaksi di pasar sebenarnya.

“Aplikasi virtual trading dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui website BEI. September nanti akan tersedia aplikasinya di android dan IOS,” papar dia.

Inarno Djajadi menjelaskan, meski tahun ini diwarnai pandemi Covid-19, BEI berhasil membawa 35 perusahaan tercatat baru di bursa. Total perusahaan tercatat di BEI kini berjumlah 701 emiten.

“Selain itu, yang patut disyukuri, jumlah investor di pasar modal sudah mencapai 3,02 juta investor, tumbuh tiga kali lipat sejak tahun 2016. Satu hal yang menarik, adanya pertumbuhan investor ritel sejak Maret meski dalam kondisi PSBB,” ujar Inarno.

Dari total 3,02 juta investor, kata Inarno Djajadi, sekitar 42% di antaranya merupakan investor saham. Rata-rata harian investor ritel saham yang melakukan transaksi sejak Maret sampai Juli 2020 meningkat 82,4%. Angka investor ritel yang bertransaksi pada Juli berada di atas rata-rata investor aktif ritel sejak awal 2020 sebanyak 65 ribu investor ritel.

Menurut Inarno, indeks harga saham gabungan (IHSG) sampai 7 Agustus 2020 masih ditutup di zona merah dengan pelemahan sebesar 18,34%. Hal yang sama dialami bursa global lain yang memiliki total kapitalisasi pasar lebih besar atau sama dengan US\$ 100 miliar. “Namun, pasar modal Indonesia masih berhasil mencatatkan perkembangan yang positif dan kinerja tertinggi di antara bursa-bursa Asean,” tegas dia.

Inarno Djajadi mengakui, IHSG sempat jatuh ke titik terendah pada 24 Maret 2020, yakni di level 3.937 atau turun 37,5% dibandingkan penutupan akhir Desember 2019. Namun, pada Jumat, 7 Agustus 2020, IHSG kembali meningkat ke level 5.143, naik 30,6% dari level terendah.

Dia menambahkan, dari sisi pasokan (supply), sampai 10 Agustus 2020, BEI mencatatkan 35 saham emiten baru sekaligus merupakan yang tertinggi di antara bursa Asean, dengan rincian bursa Malaysia (11 saham emiten baru), Singapura (lima saham emiten baru), Thailand (empat saham emiten baru), dan Filipina (satu saham emiten baru) per 31 Juli 2020.

Adapun dari sisi penggalangan dana, menurut Inarno, BEI berada di peringkat ke-2 Asean dengan nilai US\$ 260 juta, di bawah Thailand US\$ 2,76 miliar. (az)



HARAPAN

ARTIKEL JURNALISTIK

Lilik Darmawan
Media Indonesia

Agar Usaha Tetap Berdiri pada Masa Pandemi

PRIA berusia 26 tahun Zaki Zakaria namanya, terlihat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pelaku usaha konveksi. Meski terdampak secara signifikan akibat pandemi Covid-19, tetapi Zaki bersama sejumlah karyawannya tetap berusaha untuk survive. Hingga kini, usaha Kecean Clothing yang ada di Banyumas tersebut masih tetap ada kerjaan pembuatan kaos para pelanggan.

"Pandemi berdampak bagi semuanya, termasuk usaha yang saya jalani. Sebelum pandemi, omset setiap bulannya bisa tembus Rp100 juta hingga Rp120 juta, kini terjun bebas. Paling maksimal hanya Rp40 juta hingga Rp50 juta. Anjaknya lebih dari 50%. Kenyataan seperti itu memang membutuhkan kreativitas agar tetap survive. Alhamdulillah, ternyata pemerintah memberikan banyak stimulan yang membuat kami bisa," kata Zaki, Senin (2/11).

Ketika tengah terpuruk, ada pemberian stimulus bantuan. Salah satu yang ia manfaatkan adalah kredit mikro tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp10 juta. "Dengan fasilitas itu, saya bisa pinjam Rp10 juta tanpa agunan. Setelah cair, pengembaliannya tidak bulan berikutnya, melainkan tiga bulan setelah dana diterima. Jelas sangat membantu kami sebagai pelaku usaha kecil. Di sisi lain, khususnya usaha konveksi, termasuk saya, mendapat pesanan masker dari Pemprov Jateng, sehingga bisa menambah pemasukan. Ini juga sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (Aspikmas) Pujianto mengakui semua pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah terus mengulirkan bantuan agar pelaku usaha tetap bertahan. "Banyak yang memanfaatkan program restrukturisasi perbankan seperti tambahan kredit, subsidi bunga maupun penundaan cicilan kredit. Tentu saja sangat membantu bagi kami yang sangat terdampak pandemi," ujarnya.

Tak hanya di Banyumas, pelaku usaha Batik Rajasa Mas di Maos, Cilacap, Euis Rohaini, mengatakan rancangan bisnis yang telah dibuat awal tahun menjadi ambyar. Sebab, begitu muncul kasus Covid-19 pada Maret lalu, usahanya sempat mengalami stagnasi. "Bayangkan saja, pesanan seragam batik tidak ada. Seluruh anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tamu-tamu yang biasa datang ke sini, juga tak ada lagi. Omset mengalami penurunan sangat drastis. Padahal, untuk satu semester saja, kami bisa melayani seragam batik dengan nilai Rp500 juta," kata Euis.

Tetapi sebagai pelaku usaha, Euis harus terus berusaha agar tetap survive, sehingga tidak ada PHK karyawan yang kini jumlahnya mencapai 60 orang. "Kondisinya memang sangat sulit, tetapi harus terus diusahakan supaya bertahan. Misalnya, saat sekarang saya harus memperkuat pemasaran secara daring. Itu dilakukan untuk penggantian pemasaran off line dan ekspor yang terhenti. Lumayan juga, jika sebelum pandemi omset daring hanya Rp60 juta, kini meningkat Rp100 juta. Memang, belum sampai menggantikan omset pada saat normal sebelum ada Covid-19. Namun, setidaknya tidak melakukan PHK terhadap karyawan," lanjut Euis.

Dalam kondisi sulit ini, Euis juga terbantu dengan adanya restrukturisasi perbankan. Dia mengikuti program relaksasi kredit, sehingga sejak Maret lalu, dirinya dapat menunda angsuran. "Kami bisa bernapas panjang kembali. Dengan adanya relaksasi kredit, maka bebannya lebih ringan. Di sisi lain, kami melakukan diversifikasi produk dengan membuat masker. Beberapa waktu lalu, kami terbantu karena adanya pesanan dari Dinas Kesehatan Jateng berupa masker dengan jumlah 200 ribu," terangnya.

Sementara pelaku usaha gula kelapa di Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Fatih Hidayat mengaku memanfaatkan subsidi bunga. "Program subsidi bunga semacam ini memberi kelonggaran dan membantu bagi pelaku usaha. Dengan demikian, kami juga harus konsekuen untuk menjalankan usaha di masa pandemi. Alhamdulillah, kami masih bisa mengekspor gula kristal ke Amerika Serikat pada pertengahan Oktober lalu. Jumlahnya mencapai 24 ton. Secara total, tahun ini kami masih dapat mengekspor sebanyak 300 ton ke sejumlah negara di Eropa dan AS. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah saling sinergi. Pemerintah memberikan bantuan dan pelaku usaha terus berinovasi. Hanya dengan kolaborasi semacam itu, mudah-mudahan bisa melewati kesulitan di masa pandemi," harapnya.

Awasi Penumpang Gelap

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Sumarlan mengungkapkan bahwa dampak pandemi Covid-19 memang sangat dirasakan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 yang intinya mengenai stimulus dampak Covid-19. "Sejak aturan itu dikeluarkan, kami terus melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di empat kabupaten wilayah kerja OJK Purwokerto yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap. Ada beberapa cara restrukturisasi pembiayaan yakni penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok atau bunga, penambahan pembiayaan dan konversi kredit. Itu semua terus kami sosialisasikan kepada pelaku UMKM," kata Sumarlan.

Namun demikian, dengan adanya kemudahan tersebut dibarengi dengan kehati-hatian, salah satunya adalah pengawasan penumpang gelap. "Artinya, pelaku usaha yang memang sudah bermasalah sebelum ada pandemi, tidak dapat ikut serta. Jangan sampai mereka memanfaatkan kemudahan ini. Sebab, fasilitas yang diberikan benar-benar untuk pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi. Intinya, OJK tidak menoleransi penumpang gelap," tegasnya.

Sumarlan menambahkan, OJK terus melakukan pemantauan dan pengawasan, sehingga perbankan juga tidak memberikan fasilitas tersebut kepada pelaku usaha yang memang telah bermasalah. "Jadi, harus dibedakan, bahwa pelaku UMKM yang mendapat fasilitas adalah mereka yang sebelumnya tidak bermasalah, tetapi terdampak pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia mengatakan di wilayah kerja OJK Purwokerto, ada 152 ribu lebih pelaku UMKM yang terdampak dengan nilai outstanding mencapai Rp9,3 triliun di perbankan umum. Hingga pertengahan Oktober, yang telah direstrukturisasi sebanyak 139 ribu lebih dengan outstanding mencapai Rp8,8 triliun lebih atau telah mencapai 94,65%. "Yang sudah selesai Banjarnegara mencapai 100%, sedangkan Cilacap masih sedikit mencapai 89,49%. Makanya kami terus melakukan sosialisasi dan datanya terus bertambah," ujar Sumarlan.

Sedangkan untuk BPR dan BPRS, data pelaku UMKM yang terverifikasi sebanyak 27 ribu lebih debitur dengan nilai outstanding kredit Rp668,9 miliar dan telah terealisasi subsidi bunga untuk 15 ribu lebih debitur dengan nilai outstanding Rp5,6 miliar.

Berbagai fasilitas itu diakui memang sangat membantu para pelaku UMKM. Para pelaku usaha jadi lebih bernapas panjang dalam menghadapi pandemi. Kreativitas dan inovasi menjadi modal lain agar mampu terus bertahan.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Siti Masudah Isnawati
Suara Merdeka

Restrukturisasi Kredit Angkat UMKM Tenun dan Batik Kembali Bangkit

Enam unit mesin tenun manual atau alat tenun bukan mesin (ATBM) memenuhi ruang belakang di sebuah rumah di Gang Flamboyan, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Senin (2/11). Seorang pekerja tampak serius menyambung helai demi helai benang pada salah satu ATBM.

Sementara itu, di halaman belakang, Agung Amarni (28) terlihat menggambar motif tenun di atas meja. Dengan menggunakan canting kecil, ia menuangkan warna merah pada motif yang telah digambar. Hari itu, Agung membuat motif untuk kain tenun ulang (rewoven) pesanan pelanggannya dari Papua.

Usaha pembuatan kain tenun ATBM milik Agung Amarni, baru sebulan beroperasi kembali setelah berhenti produksi karena dihantam pandemi Covid-19. Setelah mengajukan restrukturisasi kredit ke BRI Agustus lalu, Agung mulai menyesuaikan keuangannya. Usaha tenun ATBM mulai bangkit kembali menghidupi keluarganya, dan keluarga pekerja yang bekerja dengannya.

Pandemi Covid-19 sejak Maret lalu, telah memukul telak sektor UMKM. Tidak terkecuali usaha pembuatan kain tenun ATBM yang dijalankan Agung Amarni. Agung mengatakan, sejak Maret, pesanan kain tenun ATBM ke rumah produksinya berangsur-angsur menurun.

Menurut Agung, sebelum pandemi, empat unit ATBM biasanya memproduksi 300 meter hingga 400 meter kain tenun ATBM perbulan. Namun sejak Maret, pesanan mulai berkurang. "Ada pesanan, namun hanya sedikit, 50 meter. Hingga setelah Lebaran, pesanan berhenti total. Kami tidak ada produksi sama sekali," terang Agung.

Padahal, usaha pembuatan kain tenun ATBM itu menjadi penopang ekonomi keluarganya dan tujuh orang pekerjanya. Sejak usahanya tidak berproduksi karena tidak adanya pesanan, Agung terpaksa mengistirahatkan tujuh orang pekerjanya. Sehingga mereka kehilangan sumber pendapatan bagi keluarga mereka.

Selama berhenti produksi, sebagian pekerjanya beralih profesi. Ada yang berjualan es krim keliling, ada juga yang berjualan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di keluarganya, setiap pagi ibu Agung berjualan bubur.

Di tengah kesulitan itu, Agung gelisah memikirkan cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus dibayarkan ke bank. Karena pesanan berhenti, secara otomatis pendapatan juga berhenti. "Karena tidak ada orderan, saya bingung. Bagaimana saya membayar setoran KUR saya? Karena tidak ada pemasukan," keluhnya.

Agung hanyalah satu dari sekian banyak pelaku UMKM yang terpukul pandemi Covid-19.

Berdasarkan Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha di Jawa Tengah, usaha mikro menjadi usaha yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan. Survei itu dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 10-26 Juli 2020.

Responden perusahaan skala mikro yang mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 67,9 persen. Sementara perusahaan kecil yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 13,5 persen. Tidak jauh beda, perusahaan menengah yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 13,1 persen. Adapun perusahaan besar yang mengalami penurunan pendapatan hanya 5,4 persen.

Penundaan Cicilan

Awal Agustus lalu, saat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berkunjung ke Kota Pekalongan, Agung berkesempatan menyampaikan keluhan tentang cicilan KUR. Menanggapi keluhan Agung, Teten Masduki menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah akan terus mendorong agar UMKM bangkit karena pemulihan ekonomi nasional dimulai dari UMKM yang penyerapan tenaga kerjanya 97 persen," kata Teten.

Berekal penjelasan itu, keesokan harinya, Agung datang ke BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Landungsari untuk mengurus restrukturisasi kredit. Pengajuannya disetujui. Agung hanya membayar bunga Rp 75.000 selama enam bulan. Sebelumnya, setiap bulan Agung harus membayar Rp 658.000.

Bagi Agung, restrukturisasi kredit yang diterimanya sangat meringankan. Dengan adanya penundaan pembayaran kredit, Agung merasa tidak terlalu terbebani dengan kewajiban membayar cicilan. Sehingga ia bisa lebih fokus untuk meningkatkan usahanya guna memulihkan ekonomi keluarganya dan tujuh orang pekerjanya. "Program ini sangat besar manfaatnya bagi UMKM. Sangat membantu," tambahnya.

Setelah menerima manfaat restrukturisasi kredit, keuangannya mulai tertata. Berangsur-angsur, usahanya mulai bangkit kembali. Tujuh orang yang sebelumnya berhenti bekerja, dipanggilnya kembali untuk mengerjakan pesanan. "Sejak Oktober, saya mulai produksi lagi," kata Agung.

Saat ini, Agung tengah menyelesaikan pesanan kain tenun ATBM sebanyak 300 meter dari pelanggannya di Papua. Selain itu juga pesanan kain tenun ulang (rewoven) dari Lampung sebanyak 150 meter. Setelah usahanya kembali bangkit, tujuh keluarga yang selama ini kehilangan pekerjaan utama karena pandemi, kini menerima pendapatan lagi.

Bangkitnya usaha tenun ATBM itu juga berdampak terhadap kehidupan Tarnoto (40). Warga RT 05/ RW 05 Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan itu, kini bisa kembali bekerja. Sebelumnya, Tarnoto bekerja di usaha tenun sutra ATBM di Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Namun, pandemi memukul usaha itu.

“Sebelum bulan Ramadan sampai September, saya nganggur karena tempat kerja saya berhenti produksi. Tabungan saya sudah habis. Alhamdulillah, saya bisa bekerja lagi. Sejak tiga minggu lalu,” ujar Tarnoto saat ditemui di rumah produksi tenun ATBM milik Agung.

Selain Agung, program restrukturisasi kredit juga dimanfaatkan Musarofah (42), pelaku UMKM batik di RT 05/ RW 02 Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bedanya, Musarofah mengajukan restrukturisasi kredit ke perusahaan pembiayaan. Ia mengajukan penundaan pembayaran angsuran mobil yang biasa digunakan untuk mengantar batik ke konsumennya di Surabaya.

“Saya mengajukan penundaan pembayaran cicilan selama tiga bulan. Jika sebelumnya setiap bulan saya harus membayar Rp 2.150.000, dengan adanya program ini, selama tiga bulan saya hanya membayar Rp 500.000,” terangnya.

Setelah tiga bulan berlalu, Musarofah membayar cicilan seperti biasa. Namun, ia merasa usahanya belum pulih. Sehingga ia mengajukan penundaan lagi. “Karena batik saya belum lancar, saya mengajukan lagi dan diberi waktu selama enam bulan. Saya sangat bersyukur diberi keringanan,” sambungnya.

Sejak Surabaya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pesanan batik dari pelanggannya di Surabaya berhenti total. Sehingga usaha batik Musarofah berhenti produksi selama empat bulan. Dampaknya, tiga orang pembatik dan tujuh orang penjahit yang bekerja dengannya juga terpaksa berhenti bekerja.

Sebelum pandemi, usaha batiknya bisa memproduksi 20 kodi hingga 25 kodi daster batik setiap bulan. Daster-daster itu dikirim ke Pusat Grosir Surabaya (PGS), Pasar Turi dan ITC Surabaya Mega Grosir.

Setelah mendapat penundaan pembayaran cicilan kredit mobilnya, Musarofah menata keuangannya. Perlahan, usaha batiknya kembali menggeliat. “Sejak Oktober, saya mulai produksi lagi. Tapi produksinya belum stabil. Hasilnya hanya cukup untuk makan dan bayar sekolah. Buat setor (membayar cicilan) belum bisa. Nanti kalau produksi sudah lancar lagi, saya akan bayar cicilan seperti sebelumnya,” janjinya.

Pemulihan Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah-langkah untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya mengeluarkan kebijakan untuk membantu UMKM dan masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan skema restrukturisasi kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Kebijakan restrukturisasi kredit itu diatur dalam Peraturan OJK (POJK) 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Selain itu, POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

“Kebijakan ini telah dikeluarkan OJK sejak akhir Maret 2020 sebagai salah satu program untuk membantu pelaku UMKM yang terdampak Covid agar tetap bertahan pada masa pandemi,” terang Kepala Kantor OJK Tegal, Ludy Arlianto, Selasa (3/11).

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan bermacam-macam bentuknya. Di antaranya penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan pengurangan tunggakan bunga. Pemberian jangka waktunya juga bervariasi, sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan bank maupun leasing. Bisa tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, sampai maksimal satu tahun.

Ludy menyebutkan, hingga 16 Oktober, realisasi restrukturisasi kredit perbankan di eks karesiden Pekalongan mencapai Rp 7,05 triliun. Sementara, keseluruhan potensi restrukturisasi kredit perbankan di eks karesidenan

Pekalongan mencapai Rp 8,066 triliun.

Restrukturisasi kredit tersebut diberikan kepada 145.857 debitur 19 bank umum, 30 BPR dan satu BPRS. “Dari potensi debitur terdampak Covid-19 sebanyak 151.947, yang sudah restrukturisasi sebanyak 145.857 debitur, atau 85 persen,” terang Ludy.

Sebanyak 145.857 debitur tersebut tersebar di tujuh kabupaten/ kota. Yakni Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes. Selain itu, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan laporan dari 30 BPR dan 1 BPRS, sebagian besar debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit adalah UMKM. Debitur yang telah direstrukturisasi tercatat 7.009 dengan nilai Rp 320,272 miliar. Dari jumlah tersebut, debitur non-UMKM hanya 6,73 persen atau sekitar 471 debitur senilai Rp 33 miliar. Sedangkan debitur UMKM sebanyak 93,27 persen atau 6.537 debitur.

Sementara itu, realisasi restrukturisasi kredit Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) atau perusahaan pembiayaan hingga 8 Oktober tercatat Rp 775,884 miliar, dari total pengajuan restrukturisasi sebesar Rp 937,163 miliar. Debitur yang telah direstrukturisasi sebanyak 35.532. “Dari 41.598 yang mengajukan, yang disetujui 35.532,” sambungnya.

Jumlah tersebut belum termasuk debitur PT Pegadaian Persero dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. Hingga 10 Juli, total pengajuan restrukturisasi kredit ke PT Pegadaian di tujuh kabupaten/ kota di eks karesidenan Pekalongan sebanyak 1.311 debitur dengan nilai Rp26,076 miliar. Sedangkan restrukturisasi yang disetujui 1.022 debitur dengan nilai Rp 20,089 miliar. Adapun restrukturisasi kredit yang disetujui PT PNM Cabang Tegal dan Cabang Pekalongan tercatat 69.415 debitur senilai Rp 158,909 miliar.

Ludy mengatakan, selain melalui restrukturisasi kredit, untuk meringankan beban pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, UMKM juga diberikan subsidi bunga. Saat ini, lanjut dia, OJK Tegal juga telah menyiapkan platform umkmbangkit.id sebagai upaya membangkitkan UMKM pada masa pandemi Covid-19. “Harapannya, bagaimana pada masa pandemi ini, UMKM tetap survive, tetap jalan,” harapnya.

Program restrukturisasi kredit ini menjadi obat bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. UMKM tenun ATBM dan batik yang dijalankan Agung Amarni dan Musarofah, hanyalah sebagian kecil UMKM yang kembali bangkit setelah menerima manfaat dari program restrukturisasi kredit. Di saat UMKM nol pendapatan, debitur diberikan keringanan pembayaran cicilan pinjamannya ke bank atau perusahaan pembiayaan. Sehingga kegiatan usaha yang jatuh bisa kembali terangkat dan terus berjalan.

UMKM menjadi pilar ketahanan ekonomi yang mampu menopang perekonomian nasional. Intervensi pemerintah dengan memberi relaksasi kredit sangat berdampak positif dalam membantu UMKM terus menjaga kelangsungan dan pengembangan usahanya. Kebijakan ini telah menyelamatkan UMKM tenun, batik dan UMKM lainnya dari risiko gulung tikar. Dengan demikian, secara tidak langsung, kebijakan ini juga mencegah potensi bertambahnya jumlah pengangguran.

Sebanyak 97 persen dari sekitar 137 juta angkatan kerja di Indonesia adalah pekerja di sektor UMKM. Jika setiap UMKM yang mendapatkan restrukturisasi kredit memperkerjakan lima orang, maka kebijakan ini telah menyelamatkan ribuan pekerja.

Merujuk data 30 BPR dan 1 BPRS di eks karesidenan Pekalongan, jumlah debitur UMKM sebanyak 6.537 orang. Artinya, sebanyak 32.685 pekerja terselamatkan dari ancaman kehilangan pekerjaan. Sehingga secara tidak langsung, program restrukturisasi kredit ini telah menjaga dan menyejahterakan keluarga para pekerja di sektor UMKM.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Setia Lesmana
Tajuk.co

Jurus OJK Meredam Dampak Pandemi Covid-19

Jurus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian menuai hasil. Ekonomi mulai tumbuh, meski kecepatannya masih rendah.

Pujian mengalir ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas upayanya memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor keuangan. Apresiasi diantaranya disampaikan Komisi XI DPR RI melalui ketuanya, Dito Ganinduto saat Rapat Kerja dengan Ketua DK OJK awal Oktober lalu. Lembaga yang mengawasi aktivitas jasa keuangan di Indonesia itu dianggap berhasil menciptakan stabilitas di sektor jasa keuangan selama pandemi Covid-19 berlangsung hingga saat ini.

Pageblug yang diakibatkan virus SARS CoV2 itu, tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun turut memukul kegiatan ekonomi nasional yang terindikasi dari pertumbuhan yang melambat, pendapatan masyarakat berkurang, pengangguran bertambah, angka kemiskinan meningkat, dan derajat kesejahteraan secara luas menurun.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso saat dihubungi, Sabtu (10/10/2020) mengatakan, terbatasnya ruang gerak masyarakat karena pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap sektor finansial. Merosotnya permintaan barang dan jasa dari masyarakat juga turut memukul sejumlah industri, misalnya saja industri transportasi dan perhotelan.

Bersama pemerintah dan Bank Indonesia, OJK mengeluarkan berbagai jurus guna meredam dampaknya agar kondisi perekonomian nasional tidak terlalu dalam terperosok di jurang resesi.

Stabilitas Jasa Keuangan

Sederet kebijakan stimulus fiskal dan moneter, dari mulai program relaksasi dan restrukturisasi kredit, penempatan uang negara di perbankan, hingga subsidi bunga bagi UMKM yang dianggap lebih cepat memantik pertumbuhan ekonomi.

Melalui Peraturan OJK Nomor 11/2020 yang kemudian disusul oleh Peraturan OJK Nomor 14/2020, OJK melancarkan jurus countercyclical untuk meredam dampak Covid-19 yang lebih parah sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kedua aturan tersebut menjadi pedoman dalam melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan penetapan kualitas aset perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro dalam satu pilar.

Kebijakan tersebut berhasil menahan laju kenaikan kredit macet (NPL) dan mengurangi tekanan permodalan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga. Guna menjaga likuiditas perbankan, OJK menggunakan jurus penurunan batas minimum rasio kecukupan likuiditas (LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) serta penundaan pemberlakuan standar pengaturan perbankan Basel III. Yaitu kerangka kerja global dan sukarela tentang kecukupan modal bank, stress testing, dan risiko likuiditas pasar.

Deputi Komisiner Bidang Pengawas Perbankan, Teguh Supangkat mengatakan, OJK juga menurunkan batas minimum rasio kecukupan likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) dari sebelumnya 100% menjadi 85%. Permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Capital adequacy ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,39% serta risk-based capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506% dan 330%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%.

Angin Segar UMKM

Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menurut Wimboh, bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Iapun meminta bank-bank yang telah memperoleh

suntikan dana segar dari pemerintah tidak ragu untuk menyalurkan kredit kepada para pelaku UMKM.

Dari sisi restrukturisasi kredit, OJK mencatat, hingga 5 Oktober 2020, jumlah restrukturisasi kredit di perbankan Indonesia mencapai Rp 914,65 triliun. Jumlah kredit tersebut berasal dari 7,53 juta debitur baik sektor UMKM dan non-UMKM.

Di sektor UMKM nilainya mencapai Rp 361,98 triliun dari 5,88 juta debitur. Sedangkan dari non-UMKM jumlah kredit yang direstrukturisasi nilainya mencapai Rp 552,69 triliun dari 1,65 juta debitur. Sementara untuk restrukturisasi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp 177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak.

Berbagai kebijakan stimulus yang diberikan OJK dan pemerintah itu berdampak positif kepada segmen UMKM, tercermin dari kenaikan pertumbuhan yang positif secara bulanan di dua bulan terakhir yakni pada Agustus yang tumbuh positif 0,18% (mtm) dan September tumbuh 0,78%.

Salah seorang pelaku usaha kecil, Wawan Iskandar menyebut kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit bagi UMKM merupakan angin segar. Ditengah ambruknya pemasaran produk akibat pandemi Covid-19, lanjut Wawan, kebijakan tersebut membuat pelaku usaha sedikit bisa bernafas lega karena restrukturisasi kredit bisa menjaga cash flow bisnis.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, mengatakan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK sejak Maret 2020 itu terbukti mampu menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19.

"Kami memperpanjang tahapan percepatan pemulihan ekonomi, hingga Maret 2022," kata Wimboh.

Mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) di New York itu mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan tersebut, kata Wimboh diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini.

Mengendalikan Volatilitas Pasar Saham

Di lantai bursa, menurut Deputi Komisiner Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) OJK, Agus Edy Siregar, pihaknya bersama regulator pasar modal mengusahakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang teratur, wajar dan efisien, serta layanan pasar modal kepada seluruh pemangku kepentingan pasar modal. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan aktivitas Business Continuity Management (BCM).

Empat jurus OJK di lantai bursa, yakni buyback saham oleh emiten tanpa persetujuan RUPS, batasan auto rejection perdagangan di bursa efek, pelarangan transaksi short selling, serta trading halt 30 menit jika IHSG turun 5 persen, mampu meredam volatilitas pasar dan menarik investor asing.

OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Kami siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional," kata Wimboh.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Arvin Syahputra Nasution
Armadaberita.com

OJK Selamatkan UMKM

Terus berinovasi dan rajin berkolaborasi, dua kunci penting melewati keterpurukan ekonomi di masa pagebluk Covid-19. Itulah yang diterapkan pengusaha Songket Melayu, Irfani Ramadhani Lubis.

Tak pernah terbayangkan olehnya akan datang masa pagebluk yang merevolusi kehidupan manusia sebegini dahsyat. Pagebluk meremukkan seluruh sendi kehidupan, termasuk sendi ekonomi. Karena tak ada persiapan apa-apa, Irfani seperti menghadapi “mimpi buruk” dalam menjalankan usaha songketnya.

Betapa tidak, sejak pandemi berlangsung, pemerintah harus bekerja keras menangkal penyebar-luasan virus corona dengan mengetatkan penerapan protokol kesehatan, salah satunya dengan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah dan wajib menghindari keramaian orang.

Pengetatan protokol kesehatan itu berdampak pada penjualan usaha kain songket yang dikembangkan Irfani. Akibatnya, lebih dari separuh omzet penjualan songketnya anjlok. Peralnya, pangsa pasar kain songket Melayu tak lain adalah acara-acara hajatan, pesta pernikahan dan pentas seni budaya.

Semasa pagebluk ini, demi menerapkan protokol kesehatan, acara-acara hajatan batal, pesta nikah ditunda, kegiatan seni budaya ditiadakan. Segala hal yang berkaitan dengan “keramaian” musti dihindari. Irfani pun gigit jari.

“Saat awal pandemi, terasa sekali dampaknya. Omzet berkurang lebih dari 50 persen. Sampai-sampai, saya nyaris tidak bisa memberikan THR kepada karyawan. Tetapi, itu sudah kewajiban saya. THR tetap saya berikan, dengan cara dua kali cicil,” kata Irfani.

Dalam situasi ekonomi terpuruk, Irfani sempat berpikir untuk merampingkan karyawannya. Pilihan itulah yang paling memungkinkan. Namun, ia sadar betul, ketika usahanya berjaya, itu tak lepas dari kontribusi, dedikasi dan loyalitas seluruh karyawannya. Karena itu, ia membuang jauh ide soal perampingan karyawan itu dari benaknya. Ia bertekad untuk mempertahankan seluruh karyawannya, betapa pun sulitnya.

Namun untuk bisa mempertahankan 35 orang karyawannya, dengan tidak mengurangi hak-hak mereka secuilpun, Irfani harus bisa memastikan usahanya berkembang dan membuahkan hasil yang baik. Mulailah ia putar otak. Usaha songketnya harus tetap berproduksi.

Ia memutuskan untuk berinovasi. Kain songketnya dijahit untuk membuat tas, masker dan beragam jenis asesoris yang biasa dipakai pada acara pesta. “Nah, kami bikin masker dari kain songket. Sejak kita bikin masker, terbantulah. Alhamdulillah, kita masih bisa bertahan sampai sekarang ini,” ucapnya, saat ditemui di rumah produksinya di Jalan Kutilang No.8, Dusun VI, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Oktober 2020 lalu.

Irfani memanfaatkan sisa kain tenun songket untuk membuat masker. Dengan produk baru ini, ia berhasil merebut pangsa pasar yang baru sekaligus turut bersumbangsih mendukung upaya pemerintah melawan Covid-19. “Alhamdulillah, masker songket kita diminati banyak orang,” imbuh perempuan lulusan S-1 Jurusan Komunikasi Visual, Universitas Bina Nusantara, Jakarta itu.

Selain berinovasi dalam menciptakan produk baru berbahan songket, Irfani juga berinovasi dalam strategi penjualan. Jika selama ini penjualannya cenderung offline, kali ini Irfani mengandalkan sistem online. Ia memasarkan produk-produknya lewat market place seperti Moselo dan aplikasi lainnya.

Ia juga gencar menghubungi pelanggan-pelanggannya hingga perusahaan-perusahaan yang potensial. Alhasil, atas kerja keras, inovasi dan kolaborasi, usaha Songket Melayu Deli yang dijakankan Irfani tidak jadi gulung tikar. “Jadi kita harus punya inovasi dan harus lebih peka melihat pasar kebutuhannya apa. Tetap berusaha dan jangan patah semangat, insyaallah berhasil,” katanya.

Irfani menyadari, ketika ia berani mempertahankan seluruh karyawannya dan tetap memenuhi hak mereka, karena ia mendapatkan simbiosis mutualisme. Kini ia mendapatkan loyalitas karyawannya jauh lebih loyal.

Belum lagi karena usaha songket yang dikelola Irfani turut bergabung dengan Dewan Kesenian Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut. Bergabung di Dekranasda memberinya kesempatan lebih besar untuk memperlengkapi keterampilan karyawannya. Dekranasda Sumut kerap menggelar berbagai pelatihan yang melibatkan pemangku kewajiban (stakeholder) dan para praktisi keuangan. OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sendiri giat memberi pelatihan ke para pelaku UMKM binaan Dekranasda di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Setiap pelatihan yang diinisiasi, OJK turut mengikutsertakan stakeholder semisal dari perbankan maupun marketplace seperti shopee Indonesia, dan lainnya.

Rajin ikut pelatihan, menjadikan Irfani lebih siap menghadapi berbagai resiko bisnis. Ia semakin terampil, terlatih dan memiliki wawasan yang luas. Meski ia terbilang baru dalam dunia wirausaha ini. Irfani memutuskan untuk terjun penuh mengembangkan usaha songket sejak 2016, saat masih berfokus di satu tempat produksi yang pertama di Jalan Putri Hijau No.10, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Ketika itu, ibunya Dr. Hj. Tengku Syarfina, M.Hum memilih untuk pensiun.

Sebelum purnabakti, Syarfina mewariskan usahanya dengan lima jenis kain songket yakni motif daun tembakau deli, melati, daun ulam raja, anggrek dan katuk tampuk glugur. Semuanya itu memang diperuntukan khas Melayu Deli. Ia juga tidak melepaskan Irfani begitu saja. Tahap demitahap, ia terus mendampingi putrinya itu dalam mengembangkan bisnis, sebelum akhirnya Syarfina harus hijrah ke Jakarta untuk menikmati masa tuanya.

Namun, Irfani sosok pembelajar tangguh. Ia gigih dan tekun belajar. Atas kerja kerasnya, usahanya pun berkembang. Ia pun berhasil membuka tempat pelatihan dan pengerajin Songket di dua tempat. Suatu pencapaian yang hebat.

Tak hanya itu, kain songket khas Melayu Deli yang dikelolanya diminati banyak warga, termasuk dari berbagai instansi pemerintah. Sampai-sampai pasar produknya merambah ke kancah internasional. Kain songketnya menjangkau hingga ke Singapura dan Amerika Serikat. Irfani bersyukur, semua perkembangan usahanya tak lepas dari dukungan Dekranas yang sering dilatih OJK. Utamanya di masa pandemi

Covid-19. Semasa pandemi ini, OJK kerap menggelar pelatihan, meski secara virtual. Pelatihan virtual itu sangat membantu. Dan Irfani tidak sendiri. Setiap kali pelatihan virtual digelar OJK, ada puluhan peserta dari berbagai jenis UMKM ikut serta.

Pengerajin Terbantu

Dengan bangkitnya usaha songket Irfani, membuat banyak pengerajin terbantu. Para karyawannya yang sebagian besar bekerja secara upahan itu batal menganggur karena usaha Irfani tak jadi kolaps dan malah mulai berjaya kembali.

Asni (43), salah satu contohnya. Ibu empat anak yang merupakan warga Desa Sei Rotan, Deli Serdang itu menuturkan, perekonomian keluarganya stabil selama masa pandemi, karena majikannya tetap membayar upah dan THR tanpa ada pengurangan. Melihat sikap majikannya yang sangat peduli padanya, Asni memilih tetap bertahan menjadi penenun songket bagi usaha Irfani.

“Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bekerja sekaligus ikut pelatihan di sini. Bekerja di sini sangat membantu, karena sebelumnya, saya tidak berpenghasilan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi sebagai penenun saya digaji,” urai Asni.

Asni bercerita, awalnya ia sama sekali buta soal menenun. Timbul untuk bertenun karena diajak oleh Irfani. Ia diyakinkan bahwa keterampilan bertenun bisa dilatih, dan kelak ia bisa membantu perekonomian keluarganya. Hanya butuh 6 bulan bagi Asni belajar menenun. Sekarang ia mulai mahir. Setidaknya ia telah mampu menenun kain berupa sarung bantal, taplak meja, dan lainnya. “Dari pada di rumah nggak ada kegiatan, dengan bertenun, saya bisa bantu ekonomi keluarga saya. Apalagi masa sekarang ini ekonomi sangat sulit,” imbuhnya.

Asni tidak sendiri. Ada 30-an penenun lainnya, termasuk Nasya Azahra, gadis remaja usia belasan tahun. Namun tampaknya, ia sangat senang bertenun. Setiap hari ia belajar bertenun di rumah produksinya Irfani. Dia bergabung dengan sekelompok ibu-ibu yang juga tak kalah antusias belajar bertenun. Sebagai pelajar kelas 2 SMP, pelajaran dari sekolah tak pernah ia lewatkan. Ia selalu menuntaskan pelajarannya dari guru secara online baru kemudian ia belajar bertenun. “Sekolah dan belajar masih tetap, kan lewat online. Dari hasil bertenun, sekarang saya bisa bantu ibu,” ujarnya.

Penggerak Ekonomi di Massa Pandemi

Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Yusup Ansori menyadari, pentingnya pemberdayaan UMKM untuk terus dilakukan secara intensif dan kolaboratif antar berbagai pihak, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Sebab, UMKM diyakini dapat menjadi penggerak perekonomian bangsa di masa pandemi Covid-19. Hal itu didasari pada fakta, sekitar 60 juta warga kita adalah pelaku UMKM, yang pada 2019 menyerap hampir 95 persen dari total seluruh tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi sebesar 61 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto. “Pemberdayaan dapat berupa peningkatan literasi keuangan, asistensi penguatan kompetensi kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, pendataan UMKM potensial secara berkelanjutan ke dalam Sistem Informasi Kredit Program,” kata Yusup.

Pemberdayaan itu, kata Yusup, harus berlanjut pada perluasan akses pasar melalui fasilitasi pelaku UMKM untuk Go Platform Digital melalui Marketplace, yang akan membantu menjembatani pelaku UMKM untuk tetap dapat memproduksi dan memasarkan produk/jasa yang dihasilkan meskipun di masa pandemi Covid-19.

Terobosan yang dilakukan OJK mengingatkan kita pada krisis ekonomi '98 dan 2008. Ketika itu, sektor UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi. Dan saat ini, sektor UMKM justru paling rentan terimbas pandemi Covid-19. OJK pun turut terlibat aktif menyelamatkannya. OJK mendorong para pelaku UMKM untuk menciptakan peluang usaha baru dengan menyesuaikan perilaku belanja masyarakat yang mengarah pada layanan daring, seperti dicetus Irfani.

Yusup Ansori juga menyebut, salah satu sektor UMKM yang dapat dijadikan sasaran yaitu sektor kerajinan (kriya) dan industri kreatif bernuansa kedaerahan, sebagai bentuk keberpihakan dan kolaborasi bersama dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi di Sumatera

Utara.

Nawal, Ketua Dekranasda Sumut memuji terobosan OJK Kantor Regional 5 Sumbagut menyelamatkan para pelaku UMKM. Pasalnya, kegiatan pelatihan yang diinisiasi OJK sejalan dengan visi dan misi serta sasaran strategis Dekranasda Sumut yakni meningkatkan daya saing, perluasan akses pasar dan akses jasa keuangan, peningkatan fungsi kemitraan dengan berbagai pihak. “Termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam memperluas jaringan pemasaran produk para pelaku UMKM pengrajin dan pelaku industri kreatif di Sumatera Utara,” ujar istri Gubsu Edy Rahmayadi itu.

Terlebih di masa pandemi Covid-19, banyak pelaku UMKM sektor kerajinan dan industri kreatif yang terkena imbas dari sisi ekonomi, dikarenakan tidak dapat berinteraksi di pasar akibat pembatasan ruang dan gerak. Melalui pelatihan-pelatihan virtual ini, kata Nawal, seluruh peserta belajar untuk berinovasi dan berkeaktivitas guna memajukan usahanya masing-masing. “Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan gerbang awal pembuka untuk bentuk-bentuk kolaborasi bersama di masa mendatang,” tegasnya.

Latih UMKM Berjualan

Dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi, TPAKD yang terdiri dari OJK bersama Pemerintah, perbankan dan Shopee memberi pelatihan berjualan di marketplace ke pelaku UMKM. Seperti yang diterapkan OJK Regional 5 Sumbagut di Tanjung Balai, September lalu. Pelatihan dilakukan dalam hal Business Matching Akses Kredit UMKM dan Pelatihan UMKM Go Online secara virtual dan diikuti oleh 90 pelaku UMKM Kota Tanjung Balai.

Deputi Direktur OJK Regional 5 Sumbagut, Andi M Yusuf menyampaikan pentingnya mendorong kembali aktivitas UMKM dalam masa pandemi Covid-19 sehingga dapat menjadi motor pemulihan ekonomi daerah. Diantaranya melalui akses kredit untuk permodalan UMKM. Selain itu, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, pemanfaatan pemasaran secara online dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM agar dapat terus menjalankan operasional usahanya melalui pemanfaatan marketplace.

Guna meningkatkan fungsi pendataan para pelaku UMKM di Sumut ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), OJK Regional 5 Sumbagut bersama Pemprov juga gencar membimbing dan memberikan literasi, maupun seminar.

Agustus 2020 lalu, OJK dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provsu menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis SIKP berbasis virtual. Peningkatan fungsi pendataan tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan UMKM dan upaya pemulihan ekonomi daerah di masa Pandemi Covid-19. Bimtek atau Bimbingan Teknis SIKP tersebut diikuti 340 Operator SIKP yang berasal dari dinas terkait pemprov dan 33 Pemkab. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program kerja generik TPAKD se-Sumut 2020 tentang Business Matching Akses Kredit UMKM.

Ekonom Yakin Cara OJK Efektif Tingkatkan UMKM

Pelatihan para pelaku UMKM oleh Dekranasda yang biasa dipelopori OJK dianggap sebagai trik jitu oleh berbagai pihak. “Jika pelaku UMKM diberikan pembinaan dengan melibatkannya di berbagai event. Saya sangat yakin cara seperti ini akan efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM,” kata Ekonom asal Sumut, Gunawan Benjamin.

Selain sebagai cara efektif untuk menjaga perekonomian masyarakat di masa pandemi, pelaku UMKM juga berkesempatan mendapatkan banyak pengetahuan. “Bahkan tidak sedikit yang bisa mengembangkan usahanya di level global karena sering mendapatkan pembinaan,” jelas Gunawan yang juga analis keuangan dan merupakan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan ini.

Berbagai program OJK dinilai Gunawan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang belakangan sangat besar akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, sambungnya, OJK mesti memberikan bekal bagi UMKM untuk mengembangkan usaha atau bertahan di saat kondisi ekonomi tidak bersahabat. Kebijakan OJK akan produktif dalam menjaga ketahanan ekonomi jika memberikan skala prioritas yang besar terhadap pengembangan UMKM.

Apalagi, pelaku UMKM kita saat ini memang perlu didorong dengan lebih banyak menggunakan IT guna mengembangkan bisnisnya. Dan yang tak kalah penting akses pembiayaan pelaku UMKM ke dunia perbankan. "Saya mengapresiasi apa yang dilakukan OJK dengan sejumlah kebijakan untuk mengembangkan UMKM," sebutnya.

Jadi, sambung Gunawan, program yang dilakukan OJK ini harus bisa diperluas lagi sehingga banyak pelaku UMKM yang bisa mendapatkan manfaatnya. Masyarakat perlu didorong baik dalam tatanan pengembangan ketrampilan maupun pengetahuan.

"Sejumlah program OJK ini sudah benar. Dan tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Edukasi, pembinaan, pendampingan hingga pembiayaan harus terus dilakukan. Mengingat literasi keuangan maupun akses masyarakat ke perbankan yang dinilai masih jauh dari harapan kita semua," pungkasnya.

Bangun Basis Data UMKM

Menurut Direktur Pengawasan OJK Regional 5 Sumbagut, Antonius Ginting, membangun basis data yang kuat terkait UMKM sangat urgen. Basis data tidak sekedar mendeskripsikan tentang jumlah dan sebaran UMKM, tetapi juga menginterpretasikan tentang karakteristik, kondisi terkini, perkembangan dari waktu ke waktu, dan potensi serta kebutuhan pengembangan. "Basis data yang kuat juga merupakan modal penting yang dibutuhkan agar kolaborasi dan sinergi antar pihak dalam mengembangkan UMKM semakin terbangun," sebutnya.

Senada, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) ProvsuTiarta Sebayang menyampaikan, sesuai dengan data yang ada menunjukkan tingkat partisipasi dinas terkait di masing-masing pemerintah daerah di Sumut dalam menggugah UMKM di satuan kerja masing-masing ke dalam SIKP masih perlu ditingkatkan.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprovsu Arief S. Trinugroho mengakui, basis data UMKM di Sumut yang ada saat ini belum cukup berkualitas dalam menggambarkan secara faktual kondisi, permasalahan, perkembangan dan kebutuhan pengembangan UMKM di masing-masing sektor usaha. Karena itu, Pemprovsu, sesuai rekomendasi OJK, bertekad merealisasikan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SIKP.

Trik Jitu OJK Dalam Pemulihan Ekonomi

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso pernah menegaskan, OJK dituntut untuk senantiasa hadir dan siap berada di garda depan dalam membawa Indonesia bertahan melewati masa sulit Pandemi Covid-19 dan berperan besar mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk pemulihan itu, Wimboh mengaku punya tiga trik jitu yang difokuskan. Pertama, peningkatan kapabilitas dan fleksibilitas untuk mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, mengarahkan kebijakan untuk menjaga aspek prudensial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, mempercepat transformasi digital di sektor jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis teknologi informasi khususnya di era pandemi ini. "Kita juga harus segera menyiapkan ekosistem keuangan berbasis teknologi informasi ini dengan cepat, komprehensif dan tepat sasaran," terangnya.

Program Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk meningkatkan inklusi keuangan, OJK juga menjalankan program KUR klaster, Lakupandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).

Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menerangkan, Program PEN ini dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang saat ini telah berjumlah 195 di berbagai daerah di Tanah Air.

Selain itu, OJK bersama kementerian, regulator keuangan, dan industri jasa keuangan menyiapkan berbagai program sesuai Strategi Nasional keuangan Inklusif (SNKI) seperti meningkatkan jumlah penabung di masyarakat dengan meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Peralnya, inklusi keuangan dianggap memiliki peranan penting dan strategis sehingga

diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Diyakini dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan.

Tirta Segara menjelaskan, inklusi keuangan memiliki tiga hal penting bagi perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun. OJK juga terus mendorong pengembangan ekosistem digital akses produk dan layanan jasa keuangan sehingga memudahkan dan meningkatkan daya jangkau ke pelosok daerah. Beberapa proyek percontohan telah dibangun seperti digitalisasi aktivitas BWM, kurbali.com dan juga UMKMMU yang berkerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

Penerapan relaksasi kredit sangat membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM yang pendapatannya terdampak pandemi Covid-19. Ia memandang peran OJK dalam upaya pemulihan ekonomi nasional perlu diperkuat sesuai fungsi dan kewenangannya. "Kebijakan OJK ini meringankan tekanan ekonomi yang sedang menghimpit pelaku usaha kecil, pekerja harian di sektor informal dan masyarakat bawah pada umumnya," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah.

Tingkatkan Restrukturisasi Kredit

Salah satu upaya OJK dalam pemulihan ekonomi dan mengantisipasi tekanan perekonomian akibat pandemi Covid-19 adalah meningkatkan permodalan bank. OJK lantas mengeluarkan program restrukturisasi. Hal ini dianggap punya peran sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan meningkatkan permodalan Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik.

Sejak diluncurkan 16 Maret 2020 hingga 10 Agustus, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai nilai Rp 837,64 triliun dari 7,18 juta debitur. Jumlah tersebut, berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM mencapai Rp 353,17 triliun yang berasal dari 5,73 juta debitur. Sedangkan untuk non UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai Rp 484,47 triliun dengan jumlah debitur 1,44 juta.

Restrukturisasi itu ternyata masih ampuh membantu para pelaku UMKM atau debitur dikarenakan Pandemi Covid-19 belum usai. Sehingga, OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. "Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi," kata Wimboh Santoso.

Sinergi Dengan Pemerintah

Pemulihan ekonomi dan percepatan akses keuangan terus diimplementasikan melalui sinergi antara pemerintah dan OJK. Sinergi yang dilakukan merupakan usaha bersama dan motor penggerak pemulihan ekonomi. "Tolong ini riil untuk UMKM, agar bisa dapat akses keuangan dengan mudah," pesan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Muhammad Budi Utomo menyebut rencana ekspansi kredit dalam rangka PEN tersebut telah disalurkan pada sektor usaha produktif yang akan menasar pelaku UMKM. Para pelaku UMKM berada di wilayah pedagang pasar bekerja sama dengan pemerintah daerah dan PD Pasar melalui program Sapa Pedagang Pasar dengan pilot proyek di Kota Medan.

"Program ini diluncurkan melalui penyaluran skim KUR Super Mikro dalam rangka program kredit melawan rentenir disertai rencana digitalisasi pedagang pasar dengan Sumut Mobile dan potensi sebagai agen Laku Pandai ke depan," jelas Budi.

OJK Regional 5 Sumbagut bersama Pemprovsu, Pemkab/Pemko, Bank Indonesia, DJPB Kemenkeu, serta Industri Jasa Keuangan secara bersama terus mendorong percepatan program pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ini dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, edukasi, business matching, pendampingan, dan bimbingan teknis, baik kepada pelaku UMKM, pelaku industri jasa keuangan, maupun pemerintah daerah. (*)

“Sejumlah program OJK ini sudah benar. Dan tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Edukasi, pembinaan, pendampingan hingga pembiayaan harus terus dilakukan. Mengingat literasi keuangan maupun akses masyarakat ke perbankan yang dinilai masih jauh dari harapan kita semua,” pungkasnya.

Bangun Basis Data UMKM

Menurut Direktur Pengawasan OJK Regional 5 Sumbagut, Antonius Ginting, membangun basis data yang kuat terkait UMKM sangat urgen. Basis data tidak sekadar mendeskripsikan tentang jumlah dan sebaran UMKM, tetapi juga menginterpretasikan tentang karakteristik, kondisi terkini, perkembangan dari waktu ke waktu, dan potensi serta kebutuhan pengembangan. “Basis data yang kuat juga merupakan modal penting yang dibutuhkan agar kolaborasi dan sinergi antar pihak dalam mengembangkan UMKM semakin terbangun,” sebutnya.

Senada, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) ProvsuTiarta Sebayang menyampaikan, sesuai dengan data yang ada menunjukkan tingkat partisipasi dinas terkait di masing-masing pemerintah daerah di Sumut dalam menggunggah UMKM di satuan kerja masing-masing ke dalam SIKP masih perlu ditingkatkan.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprov Arief S. Trinugroho mengakui, basis data UMKM di Sumut yang ada saat ini belum cukup berkualitas dalam menggambarkan secara faktual kondisi, permasalahan, perkembangan dan kebutuhan pengembangan UMKM di masing-masing sektor usaha. Karena itu, Pemprov, sesuai rekomendasi OJK, bertekad merealisasikan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SIKP.

Trik Jitu OJK Dalam Pemulihan Ekonomi

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso pernah menegaskan, OJK dituntut untuk senantiasa hadir dan siap berada di garda depan dalam membawa Indonesia bertahan melewati masa sulit Pandemi Covid-19 dan berperan besar mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk pemulihan itu, Wimboh mengaku punya tiga trik jitu yang difokuskan. Pertama, peningkatan kapabilitas dan fleksibilitas untuk mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, mengarahkan kebijakan untuk menjaga aspek prudensial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, mempercepat transformasi digital di sektor jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis teknologi informasi khususnya di era pandemi ini. “Kita juga harus segera menyiapkan ekosistem keuangan berbasis teknologi informasi ini dengan cepat, komprehensif dan tepat sasaran,” terangnya.

Program Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk meningkatkan inklusi keuangan, OJK juga menjalankan program KUR klaster, Lakupandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).

Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menerangkan, Program PEN ini dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang saat ini telah berjumlah 195 di berbagai daerah di Tanah Air.

Selain itu, OJK bersama kementerian, regulator keuangan, dan industri jasa keuangan menyiapkan berbagai program sesuai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) seperti meningkatkan jumlah penabung di masyarakat dengan meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Pasalnya, inklusi keuangan dianggap memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Diyakini dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan diiringi kemampuan

pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan.

Tirta Segara menjelaskan, inklusi keuangan memiliki tiga hal penting bagi perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun. OJK juga terus mendorong pengembangan ekosistem digital akses produk dan layanan jasa keuangan sehingga memudahkan dan meningkatkan daya jangkau ke pelosok daerah. Beberapa proyek percontohan telah dibangun seperti digitalisasi aktivitas BWM, kurbali.com dan juga UMKMMU yang berkerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

Penerapan relaksasi kredit sangat membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM yang pendapatannya terdampak pandemi Covid-19. Ia memandang peran OJK dalam upaya pemulihan ekonomi nasional perlu diperkuat sesuai fungsi dan kewenangannya. “Kebijakan OJK ini meringankan tekanan ekonomi yang sedang menghimpit pelaku usaha kecil, pekerja harian di sektor informal dan masyarakat bawah pada umumnya,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah.

Tingkatkan Restrukturisasi Kredit

Salah satu upaya OJK dalam pemulihan ekonomi dan mengantisipasi tekanan perekonomian akibat pandemi Covid-19 adalah meningkatkan permodalan bank. OJK lantas mengeluarkan program restrukturisasi. Hal ini dianggap punya peran sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan meningkatkan permodalan Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik.

Sejak diluncurkan 16 Maret 2020 hingga 10 Agustus, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai nilai Rp 837,64 triliun dari 7,18 juta debitur. Jumlah tersebut, berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM mencapai Rp 353,17 triliun yang berasal dari 5,73 juta debitur. Sedangkan untuk non UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai Rp 484,47 triliun dengan jumlah debitur 1,44 juta.

Restrukturisasi itu ternyata masih ampuh membantu para pelaku UMKM atau debitur dikarenakan Pandemi Covid-19 belum usai. Sehingga, OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. “Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi,” kata Wimboh Santoso.

Sinergi Dengan Pemerintah

Pemulihan ekonomi dan percepatan akses keuangan terus diimplementasikan melalui sinergi antara pemerintah dan OJK. Sinergi yang dilakukan merupakan usaha bersama dan motor penggerak pemulihan ekonomi. “Tolong ini riil untuk UMKM, agar bisa dapat akses keuangan dengan mudah,” pesan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Muhammad Budi Utomo menyebut rencana ekspansi kredit dalam rangka PEN tersebut telah disalurkan pada sektor usaha produktif yang akan menasar pelaku UMKM. Para pelaku UMKM berada di wilayah pedagang pasar bekerja sama dengan pemerintah daerah dan PD Pasar melalui program Sapa Pedagang Pasar dengan pilot proyek di Kota Medan.

“Program ini diluncurkan melalui penyaluran skim KUR Super Mikro dalam rangka program kredit melawan rentenir disertai rencana digitalisasi pedagang pasar dengan Sumut Mobile dan potensi sebagai agen Laku Pandai ke depan,” jelas Budi.

OJK Regional 5 Sumbagut bersama Pemprov, Pemkab/Pemko, Bank Indonesia, DJPB Kemenkeu, serta Industri Jasa Keuangan secara bersama terus mendorong percepatan program pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ini dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, edukasi, business matching, pendampingan, dan bimbingan teknis, baik kepada pelaku UMKM, pelaku industri jasa keuangan, maupun pemerintah daerah. (*)



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Afrianita
Harian Umum Haluan

Relaksasi Kredit, Penyejuk di Masa Sulit

Sejak kasus Covid-19 muncul, pelaku usaha konveksi terpukul. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) oleh pemerintah, membuat siswa terpaksa belajar dari rumah. Akibatnya, bisnis seragam sekolah lesu darah.

Salah satunya dialami Emerson, pemilik usaha Lavera Konveksi di Jalan Sawahan Dalam Kota Padang. Usaha konveksi yang telah dirintisnya sejak tahun 1978 dengan 12 karyawan saat ini, harus mengalami kenyataan pahit dan sulit.

Jika sebelum pandemi, Januari dan Februari pesanan di Lavera Konveksi bisa 10 kodi dalam sebulan. Tetapi sejak pandemi, atau sejak Maret, hanya satu kodi mampu terjual dalam sebulan. (Haluan, 24 Juli 2020).

Tahun ajaran baru yang harusnya menjadi masa panen bagi usaha konveksi, ternyata kini hanya sebatas mimpi. Kenyataannya sangat jauh dari harapan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di tanah air sejak awal Maret lalu, telah meluluhlantakkan seluruh sendi perekonomian. Tak hanya usaha besar, usaha menengah dan kecil, juga ikut tepar. Hampir semua usaha saat ini mengalami penurunan pendapatan sejak Covid-19.

Jangankan untuk membayar cicilan kredit, untuk makan saja sekarang sulit. Jangankan untung besar, gaji karyawan saja tidak terbayar. Bahkan banyak usaha yang harus gulung tikar karena tak mampu menutup biaya operasional.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumbar Zirma Yusri mengatakan, dari 596.100 UMKM di Sumbar (di luar sektor pertanian dan peternakan), hampir semuanya terdampak Covid-19. (Republika, 3 September 2020)

Sedangkan hasil dari Survei Badan Pusat Statistik (BPS), hasilnya ada 34 ribu pengusaha usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha menengah dan besar (UMB) di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan sejak Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun tak menutup mata akan hal ini. Dalam menekan dampak negatif virus corona, OJK mengeluarkan jurus restrukturisasi/relaksasi kredit.

Pengertian relaksasi kredit perbankan secara hukum dengan mengacu pada Masayah and Grimble (2015), adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan.

Tujuan dari restrukturisasi kredit adalah untuk mengembalikan kondisi perekonomian debitur ke kondisi normal. Setelah kondisi pulih, maka program restrukturisasi kredit berakhir dan akan kembali ke perjanjian awal.

Kebijakan restrukturisasi atau keringanan kredit ini dituangkan melalui POJK 11/2020 yang dirilis 16 Maret 2020. Hingga saat ini, program tersebut masih berlangsung, baik di sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Debitur yang mendapatkan keringanan kredit adalah mereka yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah Rp10 miliar bagi pekerja informal, penghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR).

Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimal satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu, atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.

Menanggapi POJK tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari per April 2020 memberikan keringanan atau relaksasi kredit kepada sekitar 18 ribuan debiturnya yang terdampak Covid-19. Dengan nilai restrukturisasi kredit mencapai kisaran Rp2 triliun.

Sementara itu perusahaan pembiayaan, Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Padang, sejak pandemi hingga Oktober 2020 telah menyetujui 800 permohonan relaksasi (keringanan) kredit oleh nasabahnya berupa penundaan pembayaran angsuran kredit selama tiga hingga 6 bulan.

Di Sumatera Barat, secara keseluruhan hingga 5 Oktober 2020 lalu, menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Misran Pasaribu, restrukturisasi mencapai 204.993 rekening debitur dengan nilai kredit/pinjaman Rp11,56 Triliun oleh industri perbankan dan industri non-bank. Tiga jenis restrukturisasi yang paling banyak diberikan kepada debitur yaitu penundaan pembayaran (baik penundaan pembayaran pokok, penundaan pembayaran bunga ataupun penundaan pembayaran pokok dan bunga), perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga.

Sementara itu data secara nasional hingga 5 Oktober 2020, realisasi restrukturisasi kredit di sektor perbankan di tanah air telah mencapai sebesar Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur. (Kontan.id, 2 November 2020)

Sementara untuk restrukturisasi pembiayaan Perusahaan Pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak.

Kabar baiknya, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini diperpanjang lagi. Relaksasi yang sebelumnya bakal berakhir Maret 2021 tersebut masih akan berlaku hingga Maret 2022.

Perpanjangan itu dilakukan setelah memperhatikan asesmen terakhir yang dilakukan OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisiner OJK pada tanggal 23 September 2020.

Di saat ekonomi tak bergerak, OJK turun tangan merelaksasi aturan agar dunia usaha terbantu, lembaga keuangan tetap terjaga likuiditasnya sehingga stabilitas sistem keuangan Indonesia juga terjaga. Langkah awal OJK merestrukturisasi kredit bisa membantu menahan dampak pandemi agar tidak semakin parah. Tak hanya pelaku usaha yang terbantu, perbankan juga terselamatkan.

Dengan aturan relaksasi kredit yang dikeluarkan OJK ini maka perbankan tidak perlu menambah Non performing loan (NPL) untuk menambah cadangan kerugian akibat kredit macet. Artinya kredit yang direstrukturisasi tersebut masih terhitung lancar sehingga likuiditas perbankan juga tetap stabil.

Kebijakan relaksasi ini bak oase (penyejuk) di masa sulit. Dengan relaksasi tersebut setidaknya mampu membuat mereka yang usahanya terdampak corona, bisa bernafas lega untuk sementara. Setidaknya saat pandemi ini, sejenak tak lagi dipusingkan soal hutang. Jika nanti pandemi berakhir, usaha pulih, duit kembali mengalir, soal membayar kewajiban tentu tak pula mangkir. (*)



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Melba Ferry Adly
Bertuah Pos

Restrukturisasi, Kebijakan Jitu di Tengah Pandemi (Covid-19)

Zaglul Manan (60) akhirnya bisa bernafas lega, menenangkan pikiran, setelah kontrak pengajuan restrukturisasi kreditnya diterima oleh bank tempatnya meminjam sejumlah uang. Setidaknya selama enam bulan kedepan (Juni-November 2020) dia tidak dipusingkan dengan tagihan.

"Saya lupa pastinya kapan, yang jelas masih di April. Saya dapat informasi saat buka situs OJK yang di-share teman di sosial media. Saya pastikan ke OJK Riau di Jalan Arifin Achmad (Pekanbaru). Waktu itu saya dengan teman saya ke sana. Ternyata benar, ada keringanan kredit melalui program restrukturisasi untuk yang terdampak Covid-19. Saya disuruh ajukan permohonan ke bank bersangkutan dan ternyata diterima," ujarnya.

Kepada Bertuahpos.com, pertengahan September 2020 lalu, dia bercerita tentang kondisi ekonomi keluarganya yang mulai tergerus sejak dua tahun silam. Zaglul punya kios di Pasar Wisata Pekanbaru, dengan menjual beragam produk aksesoris bermerk, seperti tas, dompet, ikat pinggang, kacamata dan lain-lain.

Sejak 2018, jual beli di pasar itu tidak semenarik dulu. Pengunjung hanya ramai pada Sabtu-Minggu. Mereka yang datang ke kios Zaglul didominasi oleh pengunjung dari luar Pekanbaru. Kegiatan jual beli semakin suram saat memasuki 2019. "Dalam seminggu dapat dihitung jari yang beli. Itupun hanya satu, dua. Jauh lah kalau dibanding dulu," ujarnya.

Untuk menutupi modal, dia menyiasati dari keuntungan. Terutama untuk tambah jenis barang. Namun karena perputarannya lama, penghasilan yang didapat terpakai untuk menutup kebutuhan keluarga. Saat harus mengisi kios dia memanfaatkan pinjaman kredit di bank.

Pola ini ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kebutuhan rumah tangganya tak bisa diajak berkompromi, karena ada beban membayar kredit yang wajib dilunasi. Dalam sebulan, besaran angsuran yang harus dia bayar sekitar Rp3 jutaan.

Sedang penghasilan dari kios pas-pasan untuk bayar kredit, bahkan terkadang harus ditutup dengan pinjaman lain. "Jadi, lebih sering nombok," ungkapnya.

Dia kemudian mendiskusikan dengan keluarganya. "Bagaimana kalau kios itu kita jual saja," tuturnya. Kemudian uangnya dipakai untuk menutupi semua pinjaman. Gayung bersambut, pihak keluarga setuju dengan pertimbangan kondisi ekonomi yang merosot.

Namun, ternyata keadaan berkata lain. "Waktu itu juga ada musibah dan harus keluar dana banyak. Jadi rencana untuk melunasi kredit akhirnya ditangguhkan dulu. Sambil coba jalani usaha lain dari sisa uang penjualan kios yang dipakai untuk modal," ujarnya.

Kurang lebih enam bulan setelah menjual kios, Zaglul melakoni usaha penjualan pupuk ke sebagai jasa distribusi ke daerah-daerah di luar Pekanbaru. Sayang usaha itu tak berjalan lama, wabah Corona (Covid-19)

melanda. Kebijakan pemerintah mengharuskan setiap orang berada di rumah membuat harapannya sedikit punah. Iya, usahanya mandek hingga kini.

"Sempat bingung juga bagaimana caranya melunasi hutang di bank dengan kondisi ekonomi seperti ini. Sampai akhirnya saya dapat informasi kalau ada restrukturisasi kredit dari OJK. Itu sangat membantu sekali. Walau hanya enam bulan, setidaknya saya bisa kumpul uang untuk bisa melanjutkan pelunasan kredit di bank. Alhamdulillah, saya juga dapat keringanan bunga," tuturnya dengan wajah sumringah.

Angin Segar POJK Nomor 11/2020

Zaglul Manan hanya satu dari sekian juta masyarakat Riau yang risau, cemas kalau kondisi ekonominya akan semakin kacau. Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam siaran pers pada 24 Maret 2020 lalu, bak melunturkan segala rasa galau.

Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah memberikan kelonggaran berupa relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp10 miliar, baik kredit maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan, berupa penundaan kredit sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus Covid-19.

Kebijakan restrukturisasi kredit tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical, yang mengatur bahwa debitur berhak mendapatkan perlakuan khusus dan --- termasuk debitur UMKM --- yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena terdampak penyebaran COVID-19 --- baik secara langsung atau pun tidak langsung pada sektor ekonomi seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM. Sepanjang mereka (debitur) teridentifikasi terdampak Covid-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan.

Realisasi Restrukturisasi Kredit di Riau

Menurut data dari OJK Riau, tiga bulan setelah kebijakan restrukturisasi dibuka, total jumlah pengajuan sudah 104.060 kontrak permohonan. Dari jumlah itu sudah 92.319 debitur yang diterima dengan angka realisasi mencapai Rp9,31 triliun (per 8 Juni 2020). OJK Riau juga mencatat per 19 Juni 2020 sudah ada 72 perusahaan pembiayaan yang menjalankan

restrukturisasi pinjaman.

Per 31 Agustus 2020, khusus untuk perbankan di Riau, total jumlah yang disetujui untuk restrukturisasi sebanyak 110.235 debitur dengan jumlah baki debit sebesar Rp11 triliun lebih. Adapun rincian khusus UMKM sebanyak 71.345 debitur dengan baki debit Rp4,7 triliun lebih, dan non UMKM 38.890 dengan baki debit sebesar Rp6,3 triliun.

Sedangkan di perusahaan pembiayaan, debitur yang terdampak Covid-19 dan mengajukan restrukturisasi berjumlah 131.075 dengan baki debit Rp5,2 triliun. Jumlah pemohon restrukturisasi yang disetujui berjumlah 119.039 debitur dengan jumlah baki debit sebesar Rp4,5 triliun. Adapun pemohon restrukturisasi yang ditolak sebanyak 6.761 debitur dengan jumlah baki debit Rp387 miliar.

Covid-19, Ujian Nyata Bagi Perbankan dan Debitur

Wabah Covid-19 merupakan ujian tak terelakkan bagi debitur dan perbankan di Tanah Air, khususnya di Riau. Restrukturisasi hadir untuk memecah 'kebuntuan', sebagai solusi nyata atas problematika antara bank dengan debitur yang terbentur.

"Sederhananya begini, bagaimana bank bisa tumbuh dengan baik kalau debitur tidak di-maintenance (rawat) dengan baik," ujar Pimpinan Wilayah (Pinwil) BNI Riau, Sumbar, Kepri, Hidayat dalam sebut pertemuannya di Kantor OJK Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru akhir Maret lalu.

Dia menarik satu studi kasus --- dalam kondisi normal (tanpa Covid-19) --- kredit macet acap kali menjadi persoalan. Apalagi dihadapkan dengan wabah yang tak tahu kapan akan musnah. Jika ada bank yang enggan restrukturisasi, maka kredit macet di perbankan itu dipastikan menanjak tinggi. "Dan banknya akan jelek," tutur Hidayat.

"Sebagai contoh ada satu nasabah saya yang di Batam. Bisa saya pastikan omzet usaha mereka turun 80% lebih akibat corona. Inikan kondisi yang sama-sama tidak kita inginkan. Kalau saya perlakukan sama seperti biasa, sama dengan saya bunuh mereka, padahal saya tahu persis debitur ini bagus," sambungnya.

Di tengah pandemi, dia meyakini pasti ada debitur yang betul-betul terdampak dan ada juga debitur yang tetap kokoh berdiri. Porsi ini perlu dibagi dan dikemas sebaik mungkin dengan hasil assesment. OJK juga sudah mengingatkan dalam POJK-nya, agar perbankan melihat secara cermat supaya debiturnya tidak semakin 'melarat'. Oleh sebab itu penting mengedepankan moral hazard (kebersihan hati).

Jika memang wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang luas hingga menggerus pendapatan, "Sebaiknya debitur menyampaikan kondisi itu secara jujur," kata Hidayat. Bukan malah memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, agar masalah ini bisa sama-sama teratasi.

Sambutan 'Hangat' Masyarakat Riau

Jika dilihat dari angka realisasi restrukturisasi terakhir di Riau, sangat jelas bahwa perbankan dan perusahaan pembiayaan seiring sejalan mendukung program ini dalam rangka meringankan beban debitur yang terdampak pandemi. Dari angka realisasi itu, sudah jelas membuktikan bahwa program ini disambut hangat oleh masyarakat Riau.

"Jumlah debitur yang diterima jauh lebih tinggi dari jumlah yang ditolak. Dari sini saja sudah dapat kita lihat bahwa program ini sangat efektif dijalankan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan. Kami juga melihat tingkat antusias masyarakat sangat tinggi, khususnya di Riau," kata Kepala OJK Riau, Yusri, saat dihubungi Bertuahpos.com, Jumat, 31 Oktober 2020.

Yusri menggarisbawahi bahwa kebijakan restrukturisasi merupakan cara pemerintah memberikan solusi kepada debitur dengan bank yang terdampak langsung akibat pandemi ini. Dia mengatakan, pihak perbankan diperbolehkan untuk melakukan penilaian (assesment), melihat secara jelas

bagaimana debitur mengalami kesulitan.

Meski demikian, sikap selektif perbankan atau perusahaan pembiayaan yang dikedepankan untuk memberikan penilaian, tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.

"Kalau dari hasil penilaian bank bahwa debitur mereka benar terdampak Covid-19, maka debitur tersebut punya hak untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi ini. Tapi kalau debitur jauh sebelum corona sudah bermasalah, tentu saja tidak berlaku," kata Yusri.

OJK juga mewanti-wanti kepada perbankan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan atau semata-mata untuk kemuntungan (bankir). Serta mengimbau kepada debitur untuk tidak memanfaatkan situasi. Artinya para debitur harus mengerti bahwa kebijakan ini dikhususkan kepada mereka yang kesulitan menghadapi 'gempuran' Covid-19.

"Kalau memang debitur merasa terdampak silahkan saja melakukan pengajuan ke perbankan, nantikan perbankan akan melakukan assesment. Lagi pula yang akan dipertanggungjawabkan oleh perbankan adalah dana masyarakat, jadi ya, harus benar-benar kebijakan ini diterapkan," sambungnya.

Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi mendukung penuh kebijakan OJK melalui program restrukturisasi. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Riau sangat merasakan dampak dari wabah Covid-19. Kebijakan ini seharusnya dijalankan sebaik mungkin oleh perbankan daerah di Riau.

"Para UMKM akan sangat terbantu melalui restrukturisasi. Di tengah pandemi Covid-19, sudah pasti usaha mereka, sedikit banyak akan terdampak. Saya harap perbankan daerah melaksanakan program ini sebaik mungkin. Kita kan punya Bank Riau Kepri," ungkapnya.

Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh perbankan, yakni melakukan komunikasi secara intensif ke OJK, terutama terhadap beberapa kendala yang dihadapi. Meski demikian dia mendorong agar restrukturisasi tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya. "Ekonomi mereka berdampak," kata Husaimi.

Di Tengah Pandemi, Restrukturisasi Tularkan Semangat Bertahan

Daerah --- khususnya Riau --- percaya, adanya restrukturisasi sangat menopang ekonomi masyarakat di tengah pandemi. "Sebagai pemerintah daerah, program ini sudah pasti membantu ekonomi masyarakat. Karena memang itu yang dibutuhkan saat ini," kata Gubernur Riau Syamsuar kepada Bertuahpos.com, Senin, 2 November 2020 di Pekanbaru.

Pemprov Riau meyakini bahwa pusat melalui kelembagaan yang ada, akan melakukan tindakan cepat agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak semakin melarat. Restrukturisasi, kata Syamsuar, hanya satu dari sekian banyak program pemerintah melalui OJK, untuk menjaga stabilitas perekonomian. Dia punya harapan agar restrukturisasi dijalankan sesuai dengan perundang-undangan, agar target yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan.

Melihat tingginya angka realisasi restrukturisasi di Bumi Lancang Kuning, menandakan bahwa program ini sangat dibutuhkan masyarakat terdampak corona. Syamsuar meminta agar warga dan elemen masyarakat lainnya saling memberi dukungan agar para debitur dan perbankan tetap bisa berjalan, dan saling support untuk satu tujuan.

"OJK, debitur dan perbankan, kami harap bisa saling seiring sejalan. Corona boleh membuat ekonomi kita terdampak. Tapi semangat untuk bertahan menjadi bukti bahwa kita kuat dalam menghadapi situasi ini. Yakinlah, semua ini pasti ada jalan keluar," kata Syamsuar.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Ikhwan Wahyudi
LKBN Antara Biro Sumbar

Ketika Resesi Menjadi Berkah Investasi

Sejak 30 menit terakhir mata Firdaus (32) terus mengamati pergerakan angka berwarna hijau, kuning dan merah di layar telepon pintarnya.

Ia sibuk memelototi transaksi perdagangan saham di bursa lewat aplikasi yang sudah diunggah. Sesekali ia tersenyum karena angka berwarna hijau kian dominan yang artinya nilai valuasi portofolio miliknya terus bertambah.

Sejak dua tahun terakhir karyawan swasta itu menyisihkan gajinya Rp100 ribu per bulan untuk nabung saham.

Awal ketertarikannya memilih berinvestasi lewat saham setelah mendapatkan cerita teman kantor bahwa biaya kuliah anaknya dari hasil penjualan sahan yang dibelikan sang bapak sejak si anak bayi.

Ia pun mulai mempelajari bagaimana cara bertransaksi saham, kiat dan tips memilih emiten, kapan harus membeli dan menjual.

Firdaus pun mengikuti Sekolah Pasar Modal yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia cabang Padang.

Setelah itu ia pun mulai bertransaksi dan memilih saham blue chip dengan harapan nilainya akan meningkat dan bisa menjadi sumber pendanaan di masa depan.

Memasuki 2020 nilai portofolio Firdaus terus bertambah, namun memasuki Maret 2020 nilai transaksi di bursa anjlok sebagai imbas pandemi.

Ia mulai sedikit khawatir karena sejumlah saham miliknya mulai mengalami penurunan harga. Namun saat berkonsultasi dengan pihak sekuritas ia dapat saran sebaliknya saat saham anjlok waktu yang tepat untuk membeli karena harga akan kembali naik.

Pada 24 Maret 2020 ia pun memilih membeli saham Garuda Indonesia yang pada hari itu berada pada posisi terendah selama pandemi, hanya Rp150 per lembar.

Ia juga membeli saham BRI Syariah yang nilainya malah Rp135 per lembar. Sebuah keputusan berani di saat yang lain menjual ia malah membeli dengan sisa tabungan yang dimiliki.

Waktu terus bergulir firasatnya tak meleset. Saham BRI Syariah yang ia beli hanya Rp135 per lembar pada 20 Oktober 2020 harganya sudah menjadi Rp1.500 per lembar atau lebih dari 1.000 persen kenaikannya.

Demikian juga dengan saham Garuda Indonesia dari Rp150 per lembar menjadi Rp290 per lembar.

Awalnya ia sempat ragu saat semua orang melakukan aksi jual ia membeli

mumpung harga murah, ia pun menjual kembali saat harga sudah tinggi. Lain lagi kisah Rahman seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri yang sejak setahun terakhir juga sudah mulai mengenal dunia saham karena di kampusnya ada galeri bursa efek Indonesia.

Kendati masih dibiayai orang tua ia sudah menyetorkan uang untuk bertransaksi saham sebagai sarana belajar mengelola uang dan berinvestasi.

Saat pandemi tepatnya pekan ke tiga Maret tiba sejumlah saham miliknya terpuruk dan sangat ingin menjual.

Namun sahabatnya melarang dengan alasan nanti akan naik lagi nilainya. Berada di tengah ketidakpastian saat itu membuat ia gamang, namun ia berprinsip jika rugi akan menjadi pembelajaran berharga.

Ternyata sahabatnya benar, terus bertahan tidak menjual saham enam bulan kemudian nilai sahamnya terus naik.

Rahman pun tersenyum bahagia resesi dan pandemi membawa berkah karena kini nilai portofolionya melambung berlipat.

Nilai tertinggi

Di tengah pandemi nilai transaksi saham warga Sumatera Barat di Bursa Efek Indonesia pada September 2020 mencapai Rp815 miliar atau merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai sejak awal tahun ini.

"Hingga akhir September 2020 jumlah Single Investor Identification (SID) warga Sumbar telah mencapai 20.451," kata Kepala perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumbar Early Saputra.

Menurut dia tingginya nilai transaksi saham menunjukkan minat masyarakat untuk menanamkan uang di pasar modal terus meningkat.

"Untuk penambahan jumlah investor baru mencapai 2.949 orang hingga September," kata dia.

Ia menengarai dengan semakin banyaknya generasi muda yang meleak investasi membuat nilai transaksi terus meningkat.

Early menyebutkan dilihat dari aspek demografi para investor pasar modal di Sumbar didominasi oleh pelajar dan mahasiswa dengan jumlah mencapai 7.100 orang dengan rentang usia 18-25 tahun.

"Artinya 80 persen investor di Sumbar usianya berada di bawah 40 tahun," katanya.

Sementara dari sisi gender investor di Sumbar mayoritas pria dengan

perbandingan 10.400 dan perempuan 9.200.

Untuk jumlah aset saham berdasarkan usia 18-25 tahun telah mencapai Rp15 miliar.

Sedangkan untuk aset nonsaham telah mencapai Rp18 miliar, ujarnya.

Ia menyampaikan salah satu yang diminati untuk berinvestasi berupa sukuk wakaf yang jika dibeli maka keuntungannya dalam bentuk wakaf.

Terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh minus dalam dua triwulan terakhir ia menilai tidak berpengaruh terhadap minat orang menanamkan uang di pasar modal.

Ketika pasar semakin baik, pengawasan ketat maka orang akan semakin percaya bursa akan semakin antusias, katanya.

Ia menilai ini tidak lepas dari edukasi dan pengawasan yang dilakukan OJK hingga dukungan dari pemerintah yang membuat produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan anak muda.

Selain itu selama pandemi pihaknya tetap menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal yang digelar secara daring sebagai upaya pencegahan COVID-19.

Ia menyebutkan pada tahun ini telah menggelar 39 kali Sekolah Pasar Modal dengan total peserta mencapai 880 orang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan perwakilan Sumatera Barat kinerja industri pasar modal di Sumbar relatif baik di tengah pandemi.

Sepanjang tahun 2020 jumlah Single Investor Identification mencapai 19.600 dengan transaksi kumulatif hingga Agustus 2020 mencapai Rp4,75 triliun, volume transaksi 9.232,14 juta saham dengan frekuensi transaksi 1,1 juta kali.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Lukmanul Hakim
Radar Lombok

Memberantas Rentenir Berkbasis Masjid

Perluas Akses Keuangan Menyasar Usaha Mikro Melalui 'Mawar Emas'

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB gundah dan khawatir dengan maraknya pelaku usaha yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi yang akrab disebut dengan 'rentenir' atau 'bank subuh alias bank rontok' di tengah masyarakat

Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, keberadaan rentenir ini justru bukan membantu untuk meringankan masalah, justru semakin menambah beban hingga memiskin masyarakat. Karena bunga pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau peminjam sangat tinggi dan polanya setiap hari harus disetor (angsuran).

Semakin mengguritanya keberadaan rentenir di tengah masyarakat terlebih di tengah pandemi Covid-19, membuat OJK NTB bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bertekad secara bersama sama untuk memberantas ruang gerak rentenir dengan menghadirkan kemudahan dan mendekatkan layanan industri keuangan di tengah masyarakat di desa yang selama ini hanya mengandalkan pinjaman uang dari rentenir, karena merasa proses cepat, meski bunganya sangat tinggi. OJK bersama TPAKD NTB bersepakat menghadirkan terobosan dengan membentuk program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau dikenal dengan sebutan 'Mawar Emas'.

Untuk mengefektifkan program Mawar Emas ini, OJK NTB bersama TPAKD menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB. Sementara itu terdapat dua lembaga keuangan yang dilibatkan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat kecil yang selama ini menjadi sasaran empuk 'bank subuh' alias rentenir, yakni Bank NTB Syariah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Adapun pola pembiayaan yang diterapkan kepada nasabah atau masyarakat pelaku UMKM adalah dengan akad Qardhul Hasan, istilah pembiayaan dalam keuangan syariah. Besaran pembiayaan diberikan mulai dari Rp 1 juta hingga maksimal Rp 2 juta per orang yang tergabung dalam kelompok. Setiap kelompok jumlah pedagang dan masyarakat kecil bervariasi, mulai dari 15 hingga 20 orang.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Farid Faletehan mengatakan untuk menjalankan program Mawar Emas sebagai amunisi memberantas keberadaan rentenir di tengah masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, terlebih di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), OJK NTB bersama TPAKD dan MES NTB

terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada Takmir Masjid secara bertahap.

“Terbentuknya ‘Mawar Emas’ ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ‘unbankable’ dan selama ini tidak bisa lepas dari jerat rentenir untuk dapat mengakses pembiayaan super mikro dengan biaya yang murah dan proses mudah ditengah pandemi Covid-19 ini,” kata Farid Faletahan, Senin (26/10).

Setelah diluncurkan secara resmi pada Rabu 12 Agustus 2020 di Lombok Timur, OJK NTB bersama TPAKD NTB dan MES NTB melakukan gerak cepat memperluas pembiayaan ‘Mawar Emas’. Mulai dari melatih Takmir Masjid hingga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pedagang dan masyarakat kecil yang menjadi sasaran dari pembiayaan ‘Mawar Emas’.

Farid menyebut sudah ada 113 masjid yang mendapatkan pelatihan pengelolaan pembiayaan berbasis masjid yang tersebar di NTB. Dari jumlah 113 masjid, terdapat 62 masjid yang sudah menyalurkan pembiayaan kepada pedagang dan masyarakat kecil, yakni 60 masjid dari Bank NTB Syariah dan 2 masjid dari PT PNM. Jumlah pedagang dan masyarakat kecil yang sudah mendapatkan pembiayaan dari program ‘Mawar Emas’ ini sebanyak 560 orang penerima dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 581 juta.

“Kita ingin jumlah nasabah pedagang dan masyarakat kecil yang mendapatkan pembiayaan sampai Desember 2020 nanti diangka 1.000 orang. Karena itu, kami terus bergerak memberikan pelatihan kepada Takmir Masjid,” terangnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi NTB Dr H Lalu Syafi’i menyebut kehadiran program ‘Mawar Emas’ ini sebagai salah satu upaya pemerintah bersama OJK NTB memperluas layanan industri keuangan kepada pedagang dan masyarakat kecil di pedesaan. Selama ini, masyarakat di pedesaan kesulitan mendapatkan layanan perbankan. Bahkan tak sedikit masyarakat terpaksa meminjam uang di rentenir yang selama ini menggerogoti perekonomian masyarakat dengan memberlakukan bunga sangat tinggi.

“Kita harapkan ‘Mawar Emas’ ini dapat memperluas akses keuangan kepada masyarakat untuk memberantas rentenir. Sehingga kedepannya menjadi pilar dalam peningkatan perekonomian umat,” katanya.

Kehadiran program ‘Mawar Emas’ lanjut Lalu Syafi’i untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini belum dapat mengakses pinjaman di perbankan, karena berbagai kendala. Salah satunya unbankable,

karena usahanya terbatas, tidak memiliki jaminan sampai bertempat tinggal di pedesaan yang sulit mengakses pinjaman di lembaga resmi, seperti perbankan.

Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) ini dipilih, karena keberadaan masjid ada di seluruh pelosok desa dan perkampungan. Masjid juga tidak mengenal status sosial, sehingga semua lapisan masyarakat dengan mudah datang dan berkumpul di masjid. Dengan pendekatan berbasis masjid inilah menjadi harapan program ‘Mawar Emas’ bisa lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga menjadi alternatif pembiayaan dan nantinya secara perlahan mampu memberantas keberadaan rentenir yang semakin mencekik perekonomian masyarakat NTB.

“Kehadiran ‘Mawar Emas’ ini menjadi pemutus mata rantai rentenir yang sudah cukup lama menjerat masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB Dr Hj Baiq Mulianah mengatakan kehadiran program ‘Mawar Emas’ di tengah masyarakat di masa pandemi Covid-19 menjadi peluang untuk memasyarakatkan keuangan syariah. Karena dalam pembiayaan di program ‘Mawar Emas’ menerapkan sistem syariah dengan akad Qardhul Hasan atau tanpa bunga.

“Alhamdulillah MES NTB bersama pihak terkait lainnya telah mengkonsolidasikan beberapa masjid untuk program ‘Mawar Emas’ termasuk ikut memberikan pelatihan kepada Takmir Masjid,” ungkap Hj Mulianah.

Mulianah menyatakan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membumikan keuangan syariah di NTB melalui program ‘Mawar Emas’ dalam memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini sudah merasa nyaman dengan rentenir, karena akses dengan lembaga keuangan resmi yang terbatas disebabkan jarak tempuh jauh dan lainnya.

“Dengan lahirnya program ‘Mawar Emas’ ini diharapkan mampu membangkitkan perekonomian pedagang dan masyarakat kecil,” pungkasnya.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

A. Nabhani Bin Nu'man
Harian Ekonomi Neraca

Menjaga Geliat Usaha di Tengah Pandemi

Berkah Restrukturisasi, UMKM Bisa Bernafas Panjang

Pandemi Covid-19 memberikan dampak hampir di semua sektor, terlebih pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Khadijah (40), merasakan betul omset bisnis warung makan sunda miliknya turun tajam dan nyaris bangkrut karena sepi pembeli seiring dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Awal pandemi Maret lalu, pelanggan mulai jarang datang dan bahkan pesanan kateringpun tidak ada. Sekalipun ada pembeli hanya dibungkus dan bisa dihitung dengan jari," ceritanya.

Dirinya menuturkan, sebelum pandemi, warung makan yang terletak di Rangkasbitung, Lebak Banten ini selalu ramai para pembeli, khususnya para wisatawan ataupun supir angkutan dan juga logistik yang singgah. Maklum saja, lokasinya tepat dipinggir jalan besar provinsi menjadi daya tarik para pengunjung, apalagi ciri kas pecak bandeng dan sambelnya selalu laris manis. Bahkan, kata ibu 4 anak ini, bila jelang weekend dan hari libur, pengunjung akan membludak hingga ke halaman parkir.

Namun kini, gara-gara virus corona, bisnis warung makan yang sudah digeluti 5 tahun lalu turun drastis hingga harus merumahkan beberapa karyawan karena sepi pembeli. Selain itu, dirinya juga mengaku harus menunda cicilan pinjaman bank karena pendapatan yang minus. "Tidak hanya bisnis lesu yang jadi beban pikiran saya, tetapi juga pinjaman bank untuk tambah modal beberapa waktu lalu belum terbayar dan apalagi buat gaji pegawai," katanya.

Sempat putus asa karena tidak mampu bayar kredit bank dan bakal menutup bisnisnya guna melunasi utang menjadi pilihan terburuk. Terlebih bulan Ramadhan biasanya banyak pelanggan dan berharap bisa pulih bisnisnya, rupanya juga diluar harapan karena tetap sepi pembeli karena pandemi belum reda. Menyadari banyaknya pelaku UMKM yang rentan terdampak pandemi Covid-19, direspon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan relaksasi kepada perbankan agar bisa melakukan restrukturisasi, yakni memberikan penundaan untuk pembayaran pokok utang maupun bunga atau penurunan suku bunga yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar bisnis UMKM kembali menggeliat dan tahan banting.

Berkah dari kebijakan tersebut, geliat bisnis warung makan Khadijah mulai berangsur kembali pulih dan bisa bernafas lega. Kata Khadijah, info relaksasi kredit didapat dari media masa dan tanpa pikir panjang langsung mengajukan keringanan penundaan bayar pinjaman bank. Alhasil, permohonannya pun disetujui sehingga dirinya menikmati penundaan bayar pinjaman hingga beberapa bulan kedepan serta potongan bunga. "Alhamdulillah, kebijakan ini sangat membantu dan saya sekarang bisa bernafas lega, bisnis warung makan tidak jadi tutup karena bank beri keringanan kredit bagi usaha saya sampai bisa pulih kembali," ungkapnya.

Pengalaman yang sama juga disampaikan Dewi (25), bisnis kue basah miliknya juga terdampak pandemi karena penjualan turun. Alhasil, cicilan mobil barang untuk pengiriman kue di salah satu perusahaan pembiayaan nunggak. "Untung saja ada kebijakan relaksasi kredit, cukup membantu usaha saya yang mulai kembali bangkit," tandasnya.

Diakuinya, dampak kebijakan relaksasi kredit yang dirilis OJK membantu

operasional usahanya. Dimana, biaya hasil penjualan bisa dioptimalkan untuk bisnis kedepannya. Asal tahu saja, sektor UMKM lebih rentan dalam masa perebak virus corona. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, UMKM lebih rentan dalam menghadapi Covid-19 karena mengalami penurunan pendapatan lebih besar ketimbang segmen korporasi.

Besarnya risiko pailit pada usaha mikro, membuat segmen usaha mikro mengalami dampak penurunan pendapatan terbesar. Hal ini disebabkan dari sisi pasokan dan permintaan serta adanya pembatasan pergerakan. "Memang usaha menengah, kecil, dan mikro ini berdampak signifikan karena mereka tidak bisa berusaha. Dan itu terasa sekali mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu, di mana penutupan pasar-pasar, penutupan mal berdampak sangat serius pada kemampuan pengusaha-pengusaha kecil dan mikro untuk berusaha dan langsung berdampak kepada kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran pokok (utang) maupun bunganya kepada perbankan," kata Kartika.

Menjadi Angin Segar

Maka hadirnya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical. Dimana restrukturisasi kredit bisa diberikan kepada sejumlah debitur termasuk UMKM memberikan angin segar dan senyum lebar bagi pelaku UMKM karena bisnis usahanya bisa diselamatkan.

Kata Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, hadirnya kebijakan tersebut tidak bisa lepas karena UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi Covid-19. "UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstruktur dan modal kerjanya dijamin oleh pemerintah," tandasnya.

Wimboh mengatakan, pemerintah akan menyubsidi bunga bantuan kredit bagi UMKM. Begitu juga dengan industri padat karya. Namun, untuk industri padat karya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut. "Korporasi padat karya dijamin. Tapi diskusi korporasi ini kan perlu waktu, sehingga kita mulai dari apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit, apakah faktor pemasaran, faktor bahan baku, ini lebih kompleks," kata Wimboh.

Bahkan guna memberikan dampak lebih luas bagi roda ekonomi UMKM, OJK sempat memperpanjang kebijakan restrukturisasi tersebut. Disampaikan Wimboh, perpanjangan relaksasi restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini.

Disampaikan Wimboh, kebijakan restrukturisasi yang kini udah diperpanjang hingga Maret 2022 disebabkan karena pemulihan membutuhkan waktu. Namun demikian, perpanjangan ini menekankan penerapan manajemen risiko bank lebih memadai. Dia menjelaskan penerapan perpanjangan

restrukturisasi itu mencakup penilaian kemampuan bertahan dan prospek usaha debitur oleh bank.

Selain itu, penilaian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dibentuk bank untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan gagal bayar dari kebijakan itu. "Kehati-hatian tetap harus dilakukan sektor industri dan melihat kondisi debitur dengan detail dan jeli termasuk kalau debitur tidak punya living will, silahkan saja dibentuk cadangan," katanya.

Meski begitu, ia mengimbau lembaga jasa keuangan tetap melakukan penilaian terhadap setiap debitur yang akan diberikan perpanjangan restrukturisasi. Begitu besarnya dampak dari restrukturisasi kredit dalam menunjang bisnis UMKM di tengah pandemi, kebijakan tersebut direspon antusias yang cukup besar dari pelaku UMKM yang ingin mengajukan. OJK mencatat realisasi restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp914,65 triliun yang diberikan kepada 7,53 juta debitur terdampak pandemi Covid-19 hingga 5 Oktober 2020.

Kata Wimboh Santoso, dari total realisasi itu, komposisi jumlah debitur yang paling banyak menerima restrukturisasi kredit adalah pelaku UMKM, "Adapun jumlah debitur UMKM mencapai 5,88 juta dengan nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp361,96 triliun dan debitur non-UMKM mencapai Rp552,69 triliun kepada 1,65 juta debitur," ujarnya.

Selain relaksasi dari perbankan, OJK juga mencatat realisasi restrukturisasi kredit di perusahaan pembiayaan hingga 27 Oktober 2020 mencapai Rp177,66 triliun kepada 4,79 juta debitur. Sedangkan lembaga keuangan mikro per 31 Agustus 2020 mencapai Rp26,44 miliar dari 32 lembaga dan bank wakaf mikro per 31 Agustus 2020 mencapai Rp4,52 miliar dari 13 bank wakaf mikro.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Wawan Perdana
Tribun Sumsel

Relaksasi Kredit Memberi Asa, Marija Bangkit Merajut Mimpi

Usaha berjualan kue yang ditekuninya sejak 20 tahun lalu sempat terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Sempat terbesit pikiran, usahanya bakal gulung tikar karena sepiunya pembeli.

Sempat terseok-seok, Marija kini optimis bisa melalui badai pandemi Covid-19 ini dengan selamat.

Asa pedagang kue di Palembang ini muncul setelah mengikuti program relaksasi angsuran kredit.

Awal pekan tadi, tribunsumsel.com menjumpai wanita 56 tahun ini di Pasar Padang Selasa, Kota Palembang.

Siang itu tidak banyak lagi konsumen yang berbelanja di pasar itu.

Marija terlihat sedang duduk santai sambil ngobrol dengan beberapa pedagang lainnya.

Dagangan kue di lapaknya terlihat tinggal sedikit. Tersisa bolu, lontong, dan beberapa makanan khas Palembang.

"Sekarang masih terasa dampak pandemi meski kehidupan mulai new normal," kata ibu dari tujuh anak ini.

Hanya saja lanjutnya, kondisi sekarang jauh lebih baik dibandingkan pada Maret, April dan Mei kemarin.

Ia masih mengingat jelas, pada tiga bulan itu penjualan sangat sepi.

Jangankan meraih untung, untuk balik modal saja sangat sulit.

Saat itu Marija sempat mau putus asa. Saat dagangan sepi, ia masih harus membayar angsuran kredit ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Marija merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.

Ia meminjam uang Rp 25 juta dengan kewajiban membayar angsuran Rp 700 ribuan per bulan.

"Saat itu sangat bingung, bisa-bisa tidak makan. Apalagi mau menyelesaikan kuliah anak. Masih dua orang yang kuliah, satu lagi kelas 3 SMA," kata warga 35 Ilir Palembang ini dengan sedu.

Kegundahan itu akhirnya perlahan sirna saat mendapat kabar adanya program relaksasi kredit.

Saat ada pegawai BRI menawarkan program relaksasi, Marija langsung menyambutnya.

Ia mengambil relaksasi kredit selama enam bulan. Sehingga dalam waktu itu hanya membayar bunga sebesar Rp 60 ribuan.

"Program relaksasi sangat membantu. Kami akhirnya bisa melewati masa-masa sulit itu, sekarang kembali menatap kondisi yang lebih baik," ujarnya.

Marija merupakan satu dari ribuan pengusaha kecil yang terbantu dengan adanya kebijakan relaksasi kredit.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar hampir di semua lini.

UMKM yang selama ini jadi motor perekonomian nasional juga sangat terpuuk.

Pengusaha kecil saat ini benar-benar menghadapi situasi yang berbeda dibanding krisis tahun 1998 dan 2008.

Penjualan langsung merosot karena perubahan kebiasaan masyarakat yang mengurangi aktivitas di luar rumah.

Belum lagi masalah menurunnya daya beli karena banyak sektor ekonomi terhenti.

Pentingnya UMKM Bagi Indonesia

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan, UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

UMKM berkontribusi 97 persen terhadap pasar tenaga kerja nasional. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional juga tinggi, yaitu mencapai 61 persen.

OJK kata Untung, telah memberikan dukungan demi menyelamatkan sektor tersebut.

Diantaranya menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03.2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical sebagai dampak penyebaran Covid-19.

Ada juga POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan non bank.

POJK COVID-19 industri keuangan non bank (IKNB) ini antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi UMKM dan debitur yang terkena dampak Covid-19.

Untung menjelaskan, sampai dengan Oktober 2020, kredit bank umum di Sumatera Selatan (Sumsel) yang sudah direstrukturisasi sebesar Rp 6,16 triliun dengan total 70.219 debitur.

Kredit BPR dan BPRS yang sudah direstrukturisasi sebesar Rp0,20 triliun dengan total 1.049 debitur, kredit perusahaan pembiayaan yang sudah direstrukturisasi sebesar Rp4,69 triliun dengan total 121.727 debitur.

OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab.

OJK meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.

Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak Covid-19.

Menurut Untung, OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan.

Antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi.

Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif

berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini.

Penghapusan Utang

Pengamat Ekonomi Sumsel, Yan Sulistyo menjelaskan, relaksasi kredit merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada debitur mencicil atau bisa juga penundaan pembayaran kewajiban bulanan.

“Tentunya saja itu memberikan keringanan bagi UMKM karena kemampuan mereka sekarang cukup berat menjalankan usaha,” kata Yan.

Hanya saja lanjut Yan, pemerintah harus memikirkan tidak semua UMKM yang mendapatkan relaksasi kredit itu masih eksis berusaha.

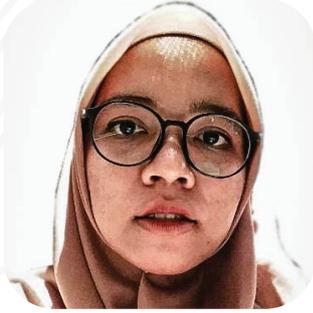
“Ada banyak UMKM yang gara-gara pandemi ini telah bangkrut,” ungkapnya. Oleh sebab itu, Yan berpendapat pemerintah lebih baik membuat kebijakan penghapusan utang UMKM.

Tentu dengan syarat dan kriteria yang ketat sehingga kebijakan ini tepat sasaran.

“Untuk membantu UMKM pemerintah semestinya membuat kebijakan penghapusan utang. Sebagai gantinya utang itu dibebankan kepada pemerintah. Itu akan lebih ampuh,” tambahnya.

Kebijakan itu perlu dilakukan karena masa pemulihan ekonomi Indonesia dampak pandemi ini bisa dua sampai tiga tahun.

UMKM butuh waktu yang panjang untuk pulih, bukan dalam hitungan bulanan atau satu tahun.



NOMINASI ARTIKEL JURNALISTIK

Desi Angriani
Medcom.id

Jalan Pintas OJK Meringankan Beban Nasabah di Masa Pandemi

Kebijakan restrukturisasi kredit yang digulirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan langkah tepat di tengah tekanan dahsyat akibat pandemi covid-19. Upaya ini menjadi jalan pintas dalam meringankan beban nasabah lembaga keuangan sehingga ekonomi Indonesia dapat segera pulih.

Mengapa demikian? Keringanan kredit ini menasar sektor informal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan sektor usaha. Mereka merupakan tulang punggung perekonomian nasional lantaran berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari 125 juta tenaga kerja, sebanyak 118 juta orang di antaranya berasal dari sektor UMKM. Jika sektor ini bangkit dan bertahan, maka ekonomi Indonesia pun bisa kembali pulih.

Apalagi jika Indonesia masuk ke dalam jurang resesi, tentu pemerintah tak bisa mengandalkan stimulus semata. Karenanya, dibutuhkan sinergitas dan kebijakan dari sisi lembaga jasa keuangan agar upaya pemulihan ekonomi tak berjalan sia-sia.

Adapun keringanan kredit ini diluncurkan pada 16 Maret lalu dengan nilai yang mencapai Rp837,64 triliun. Restrukturisasi kredit tersebut sudah diberikan kepada 7,18 juta nasabah dari 100 bank hingga Agustus 2020.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp353,17 triliun di antaranya diberikan kepada 5,73 juta debitur UMKM. Sementara sebanyak 1,44 juta debitur lainnya merupakan debitur non-UMKM dengan total saldo pokok plafon pinjaman perjanjian kredit (baki debit) yang direstrukturisasi senilai Rp484,47 triliun.

Pengusaha kue bolu susu khas Bandung, Khairiri, mengajukan keringanan pembayaran pokok dan bunga serta perpanjangan jangka waktu kredit ke BRI. Hal ini dikarenakan usahanya terimbas pandemi dan pendapatannya turun hingga 70 persen. Hal ini membuat ia kesulitan untuk membayar pinjaman kredit.

"Pinjaman BRI sangat membantu, tidak terlalu memberatkan. Keringanan yang dikasih BRI ya kalau tidak bisa setor pokok dan bunganya, jadi bulanan dikasih (hanya membayar) bunganya saja. Jadi sesuai dengan kondisi kita," ujar Khairiri.

Begitu pula dengan Hatma, debitur Bank Mandiri. Pengusaha di bidang olahan hasil laut di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ini mendapat keringanan pembayaran kredit lantaran permintaan ekspornya turun selama pandemi.

"Sekarang sama sekali tidak ada ekspor. Tidak berani membeli karena tidak bisa dipasarkan, setop sama sekali. Pembayaran kredit dijadwal ulang. Jadi satu tahun saya tidak membayar. Satu tahun kemudian saya baru membayar lagi," ungkap Hatma.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat mengatakan terdapat 102 bank yang berpotensi mengimplementasikan restrukturisasi kredit kepada 15,24 juta debitur dengan baki debit sebanyak Rp1.367 triliun. Potensi tersebut terdiri dari 12,55 juta debitur UMKM dengan baki debit sebesar Rp561,9 triliun. Sedangkan debitur non-UMKM sebanyak 2,69 juta orang dengan baki debit mencapai Rp805 triliun.

Sementara itu, restrukturisasi pinjaman yang telah dilakukan perusahaan pembiayaan (leasing) per 19 Agustus 2020 mencapai Rp162,34 triliun dari 4,34 juta nasabah. Total ada 182 perusahaan pembiayaan yang sudah merestrukturisasi pinjaman nasabahnya.

Di sisi lain, restrukturisasi juga dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Wakaf Mikro (BWM). Sebanyak 32 LKM sudah merestrukturisasi nilai pinjaman sebesar Rp20,79 miliar.

"Sementara ada 13 Bank Wakaf Mikro dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp1,73 miliar," kata Teguh dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020.

Belum maksimal? Restrukturisasi kredit perlu diperpanjang

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menilai aktivitas bisnis di sentra-sentra UMKM mulai menggeliat seiring pesatnya angka penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang mencapai Rp56 triliun di semester I-2020.

KUR tersebut disalurkan ke dua juta nasabah, dengan 59,3 persen di antaranya merupakan sektor produksi. Angka ini setara dengan 47 persen dari target penyaluran KUR yang di-breakdown pemerintah kepada BRI pada 2020 sebesar Rp120,2 triliun.

“Sebagai gambaran, April dan Mei lalu fokus aktivitas tenaga pemasar mikro BRI, yakni 80 persen restrukturisasi kredit dan sisanya 20 persen ekspansi kredit. Memasuki Juni, kondisinya mulai berbalik menjadi 76 persen ekspansi kredit dan restrukturisasi kredit hanya sebesar 24 persen,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 7 Agustus 2020 lalu.

Sayangnya kebijakan keringanan kredit ini belum dinikmati oleh seluruh pelaku UMKM. Sebab, hanya kelompok tertentu yang memiliki jaminan mampu bertahan diberikan skema relaksasi maksimal.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan mengatakan pengajuan relaksasi kredit masih sulit dilakukan. Pasalnya, peraturan yang dirilis bersifat ambigu untuk sebagian kecil pelaku UMKM.

“Peraturan OJK ini sebenarnya kebijakan yang pro UMKM tapi sayangnya turunannya banyak yang tidak clear. Harusnya wajib dan ada keberpihakan tapi bahasanya kan tidak begitu hanya dapat atau bisa,” ujar Ikhsan, dikutip dalam program Hot Room Metro TV, 4 Agustus 2020.

Serupa, Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik menilai idealnya seluruh pelaku UMKM mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas keringanan pembayaran kredit, baik melalui skema perpanjangan tenor maupun subsidi bunga.

Meski demikian, UMKM masih memerlukan akses pinjaman lunak agar relaksasi pembayaran kredit berjalan optimal.

“Oke pemerintah sudah meminta perbankan bisa restrukturisasi pembayaran bunga prinsipal, tapi kenyataannya begitu bicara sama bank, banknya tidak bisa mengeksekusi karena belum terintegrasi,” kata Suryani kepada Medcom.id, Senin, 4 Mei 2020.

Mengingat upaya keringanan kredit yang belum maksimal, OJK semestinya memperpanjang kebijakan itu hingga 2022 mendatang. Apalagi pengajuan restrukturisasi kredit pada segmen non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut meningkat.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan jika disetujui, maka jangka waktu kebijakan restrukturisasi kredit akan berlangsung hingga 31 Maret 2022.

“Kita siap, kalau perlu kita perpanjang satu tahun lagi. Bukan Februari tahun depan, tapi kita perpanjang satu tahun lagi sampai 2022,” kata Wimboh Senin, 28 September 2020.

Ia menegaskan industri perbankan dan perusahaan pembiayaan (leasing) dapat memperpanjang keringanan pinjaman kepada nasabahnya meski kebijakan ini belum resmi ditetapkan.

“Kalau ada nasabah yang sudah direstrukturisasi hanya enam bulan dan sudah jatuh tempo, kalau nasabahnya minta diperpanjang, maka silakan diperpanjang. Tidak usah minta persetujuan OJK, langsung diperpanjang,” tegasnya.

Adapun kebijakan restrukturisasi kredit ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

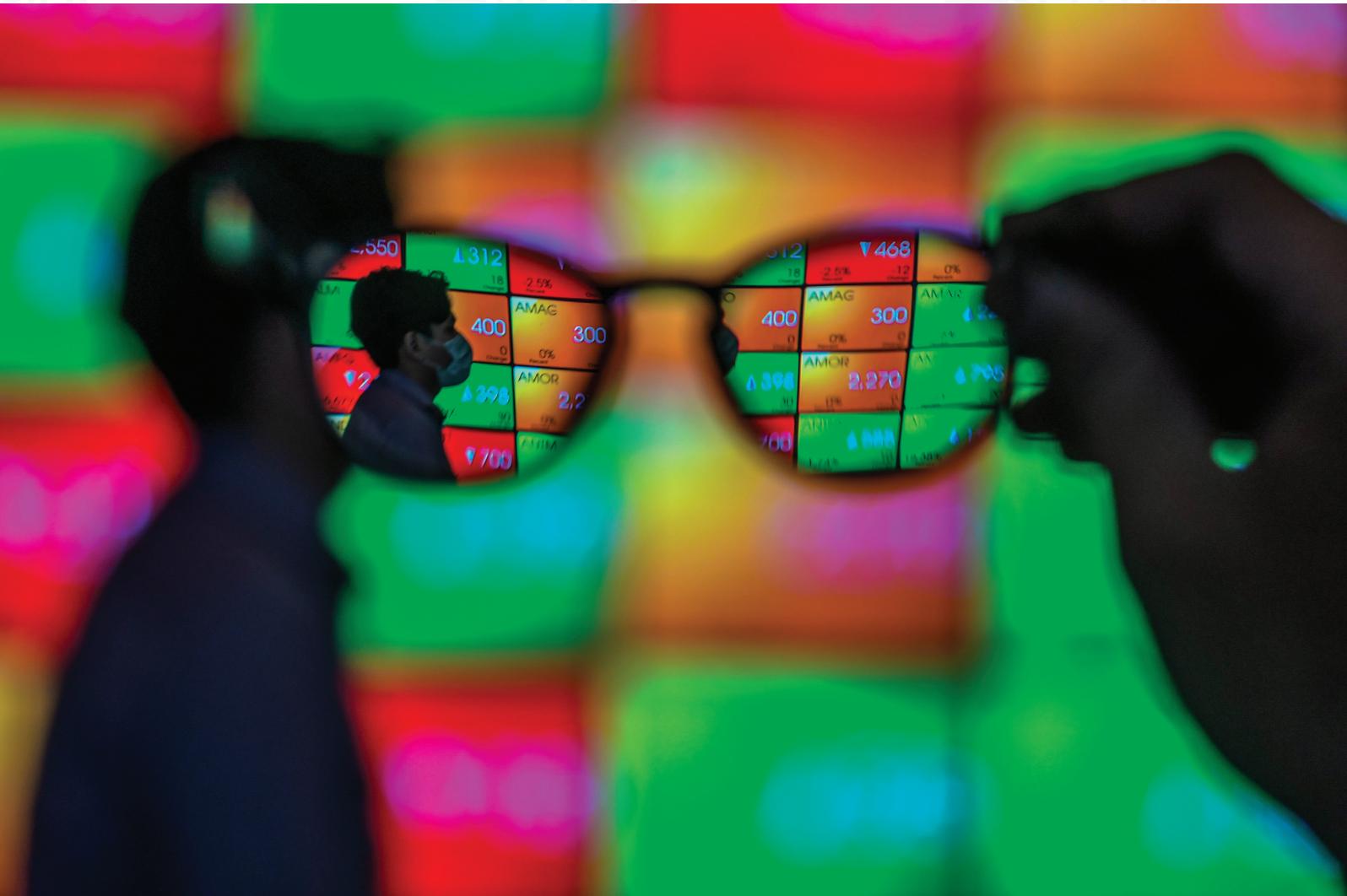


JUARA I
FOTO JURNALISTIK

Galih Pradipta

Antara Foto

Aktivitas IHSG Saat Menjelang
Diberlakukannya PSBB



Karyawan melintas di dekat layar pergerakan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/3/2020).

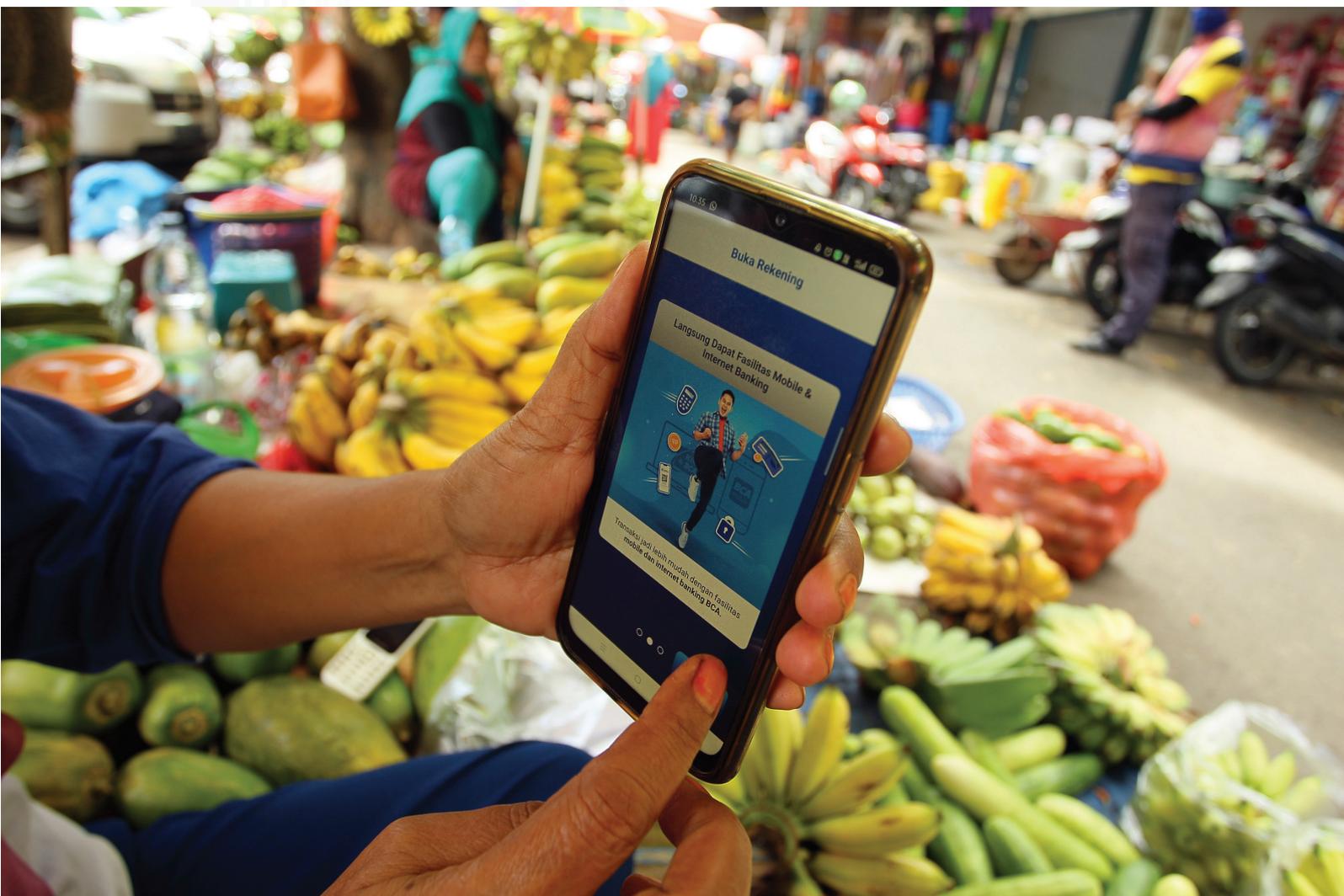


JUARA 2

FOTO JURNALISTIK

Idris Prasetiawan
Harian Pagi Palopo Pos

Buka Rekening Lewat Smartphone



Pedagang di Pusat Niaga Palopo, Sulsel, membuka rekening melalui smartphone saat berjualan, Rabu (7/10/2020). Adanya pandemi untuk membuka tabungan pun sudah bisa dilakukan dimana saja melalui gawai.

**JUARA 3**

FOTO JURNALISTIK

Agung Kuncahya Bayuaji

Xinhua News Agency

Crackers Making With Health Protocol

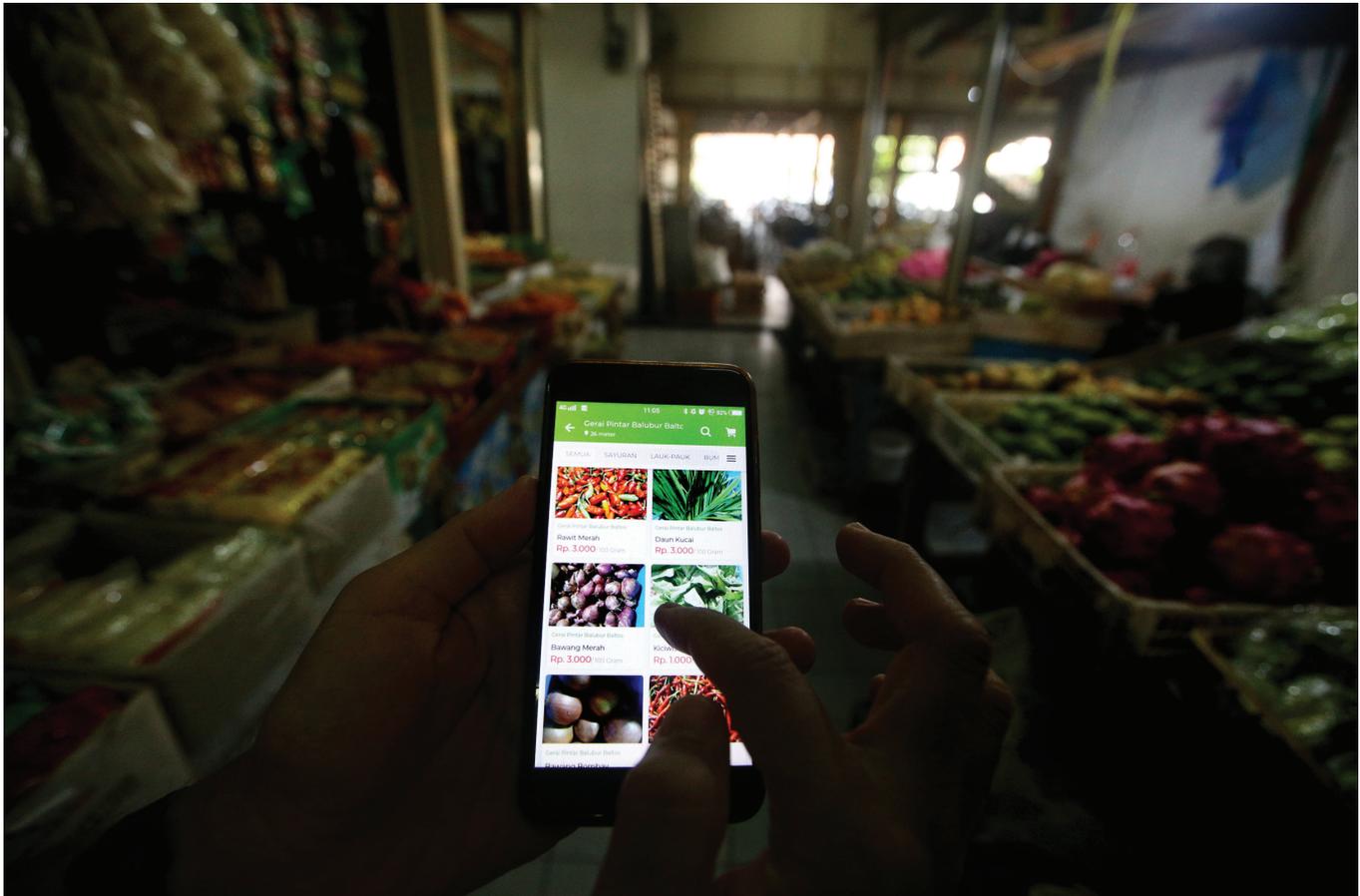


Pekerja mengenakan masker wajah dan pelindung muka memilah bahan kerupuk sesuai dikukus di sentra pembuatan kerupuk Pasunda di Depok, Jawa Barat, Indonesia, Kamis (13/8/2020). Menkeu, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi 9 juta pelaku usaha sangat kecil untuk diberikan bantuan produktif sebesar Rp2,4 juta yang dapat menolong mereka menghidupkan kembali usaha yang telah berimbas oleh pandem novel coronavirus (covid-19).



HARAPAN
FOTO JURNALISTIK

Rachman
Bisnis Indonesia
Solusi Belanja Saat Pandemi



Pengunjung mencoba aplikasi Pasar Pintar melalui ponselnya saat disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Bandung di Pasar Balubur Baltos, Bandung, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi Pasar Pintar untuk memberi kemudahan berbelanja kebutuhan pokok di tengah pandemi Covid-19. Aplikasi berbasis Android yang bisa diunduh di playstore ini telah terkoneksi dengan 25 pasar tradisional dan lebih dari 75 dropshiper di Kota Bandung.



HARAPAN
FOTO JURNALISTIK

Rubianto
Radar Malang
UMKM Dalam Program
Restrukturisasi Kredit



UMKM Peternak Ayam petelur, (16/4/2020) Malang. Upaya pemulihan perekonomian terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang. Di antaranya lewat program restrukturisasi kredit. Hingga akhir Agustus, restrukturisasinya sudah mencapai Rp 11,9 Triliun. Tepatnya Rp 11.903.860.693.796. Restrukturisasi kredit tersebut diberikan kepada lebih dari 176 ribu debitur. Di mana, 160.557 di antaranya adalah UMKM dan sisanya non UMKM.



HARAPAN
FOTO JURNALISTIK

Zaini
Sriwijaya Post
BWM Bantu Ekonomi Masyarakat



Pemenang Lomba Artikel dan Foto Untuk Jurnalis | 2020

Pegawai Bank Wakaf Mikro (BWM) melayani nasabah Santri Cendekia di kantornya di Pondok Pesantren Aulia Cendekia Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang, Selasa (3/11/2020). BWM merupakan program OJK yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta di lingkungan pondok pesantren di sektor pertanian, perdagangan dan pelaku industri kecil rumah tangga.



NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Oki Lukmansyah

Antara Foto

Pelayanan Bank Tetap Terapkan
Protokol Kesehatan



Karyawan melayani nasabah dengan mengenakan masker, face shield dan sarung tangan di salah satu bank di Tegal, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (14/10/2020). Demi melindungi nasabah, seluruh bank di Kota Tegal menerapkan kebijakan pengaturan jaga jarak fisik di ruang tunggu, wajib mengenakan masker dan pemeriksaan suhu tubuh guna mencegah penyebaran COVID-19.



NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Nurul Hidayat

Bisnis Indonesia

Target Penyaluran Kredit UMKM



Pekerja menyelesaikan pembuatan miniatur pesawat terbang di Anglo Air Craft Model, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong target penyaluran kredit kepada UMKM sebesar Rp. 2,8 triliun pada Oktober ini, yang bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 adalah event tahunan yang diselenggarakan selama bulan Oktober 2020.



Pelaku UMKM melakukan konsultasi keuangan dan pemasaran secara digital di stand Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam acara Technolink di The Sunan Hotel, Solo, Jumat (8/10/2020). Program Technolink diharapkan akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi bagi UMKM se Solo raya yang terdampak Covid-19 dengan membuka pasar dan transaksi secara digital.

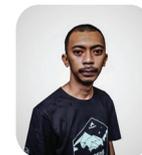


NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Sunaryo Haryo Bayu
Joss.co.id
Program Technolink OJK



Salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajukan pinjaman modal usaha di Bank Wakaf Mikro (BWM) Ummul Mukminin Aisyiyah mitra Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Makassar, Rabu (28/10/2020). OJK Regional 6 Sulampua melalui BWM Ummul Mukminin Aisyiyah berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku umkm terus bertahan menghadapi pandemi dengan tetap memberikan modal usaha untuk mendorong perekonomian nasional di masa pandemi Covid 19.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Mughtamir
Sindonews.com
OJK Bantu UMKM Di Tengah Pandemi Lewat BWM



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Muhamad Ali

Jawa Pos

Kreasi Relaksasi Pandemi



Pekerja las tengah melakukan proses restorasi mobil antik di Tangerang, Kamis (22/10/2020). Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana program restrukturisasi kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp359,98 triliun dengan jumlah 5,82 juta debitur per 28 September 2020, agar UMKM dapat segera kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Priyombodo

Kompas

Produksi Masker Kain Motif Batik



Aktivitas produksi masker kain bermotif batik di rumah produksi Kreasi Anak Indonesia (Kain) di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2020). Samsul, pemilik usaha konveksi ini mengakui produksi masker dimulai sejak pandemi karena banyaknya permintaan pasar. Masker kain bermotif batik untuk anak dan dewasa ini dijual berdasarkan pesanan dan penjualan grosir dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per potong.



Siswa mengikuti kegiatan OJK Goes to School yang juga didukung oleh bank DKI di SMKN 38 Jakarta, Kamis (13/2/2020). Untuk mendukung acara tersebut, Bank DKI juga melakukan edukasi mengenai budaya menabung sejak dini melalui produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank DKI juga menyediakan Mobile Branch di lokasi acara sebagai solusi instan pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar.



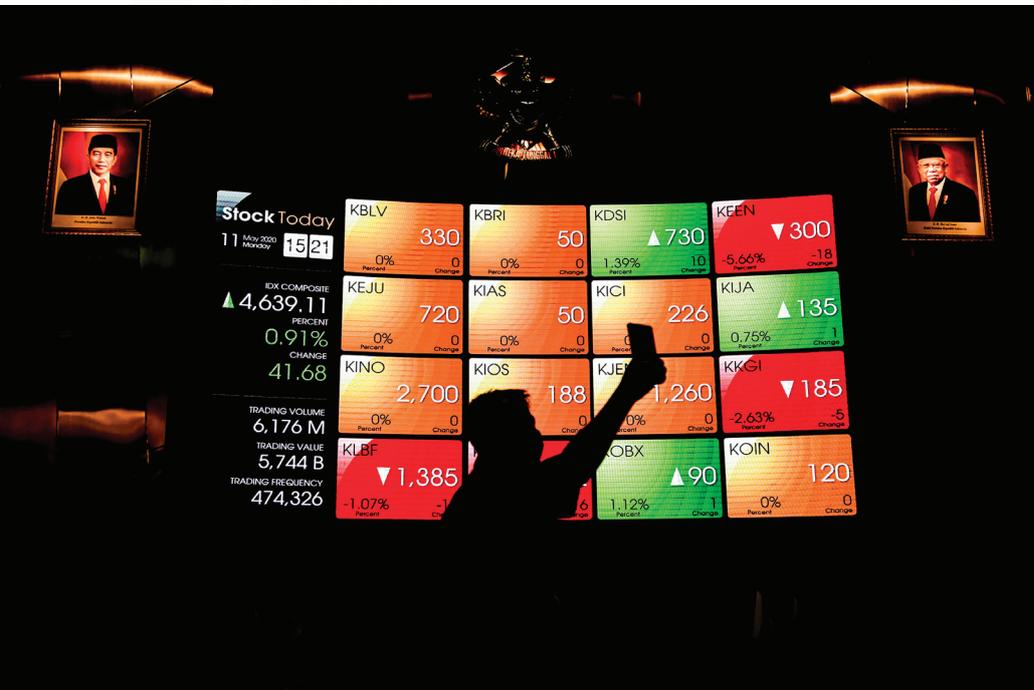
NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Agus Priatna

Inilah.com

OJK Goes To School



NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Muhammad Adimaja

Antara Foto

Peningkatan Peran Investor Domestik Di Pasar Modal

Pekerja berswafoto dengan latar belakang pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2020). Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan terjadi peningkatan peran investor domestik. Khususnya investor retail yang sejalan dengan program OJK untuk memperluas basis investor, terutama investor domestik yang diharapkan mampu menopang kinerja IHSG secara berkelanjutan.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Prasetya Fauzani

Antara Foto

Masker Disabilitas Bantuan
Perusahaan Asuransi



Warga penyandang tuna rungu mengenakan masker transparan bantuan dari perusahaan asuransi untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (23/9/2020). Asuransi Astra dengan pantauan OJK memberikan layanan sosial berupa pembagian 6.400 masker transparan kepada penyandang tuna rungu dan wicara guna mempermudah berkomunikasi saat pandemi COVID-19.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Mohammad Ayudha Ardi Kuncoro

Antara Foto

Akad Pembiayaan Bank
Wakaf Mikro OJK



Petugas Bank Wakaf Mikro (BWM) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Imam Syuhodo melakukan akad pencairan pembiayaan pinjaman di dukuh Sangiran, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (4/11/2020). Keberadaan Bank Wakaf Mikro OJK tersebut untuk membantu akses permodalan atau pembiayaan usaha bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses lembaga keuangan formal sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian kelompok masyarakat di pedesaan.



NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Abriawan Abhe

Antara Foto

Program OJK Optimalkan
Penggunaan Uang Elektronik

Warga memesan makanan dan melakukan pembayaran menggunakan aplikasi uang elektronik di salah satu restoran cepat saji di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (2/11/2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprogramkan pengoptimalan penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai alat transaksi pembayaran di industri reksadana menyusul adanya pergeseran preferensi masyarakat untuk menggunakan instrumen digital terlebih di tengah pandemi COVID-19.



NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Lilik Darmawan

Media Indonesia

Perajin Sapu

Perajin sapu di Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah, merampungkan pembuatan sapu, Rabu (4/11/2020). Usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebut tetap beroperasi karena adanya kebijakan OJK untuk memberikan relaksasi atau keringanan kredit dari perbankan.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Adi Prima
Beritaminang.com
Kebijakan Pemulihan
Ekonomi Nasional



Warga merebus air pohon aren untuk membuat gula merah aren di Andaleh, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Rabu (4/11/2020). Adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selain memberikan keringanan angsuran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendorong penyaluran KUR oleh pihak perbankan kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak pandemi supaya UMKM tetap beroperasi.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Evan Zumarli
Harian Pagi Sumatera Ekspres
Edukasi Menabung Pelajar



Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju, Bulan Inklusi Keuangan diisi oleh Kepala Dinas Pendidikan kota Palembang mengajar secara daring kepada pelajar se kota Palembang didampingi perwakilan OJK Palembang dan Bank Sumsel Babel dan beberapa pelajar diajak langsung di Balai kota dengan pembatasan prokes, Selasa (13/10/2020). Beliau mengedukasi pelajar untuk semangat belajar saat pandemi dan menghemat uang dengan menabung untuk masa depan. Cermat, bijak, dan pintar dalam menyikapi, mengolah dan menyimpang uang di bank.



Seorang tukang gunting rambut melindungi diri dengan face shield dan masker saat melayani konsumen untuk menggunting rambut di Ozz Barbershop, Palembang, Sabtu (16/5/2020). OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona (covid-19).



NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Abriansyah Liberto

Tribun Sumsel

Peran OJK Di Masa Pandemi



Perajin menyelesaikan pembuatan batik di industri rumahan di Rusun Marunda, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan 4,8 juta UMKM mendapatkan dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dana yang telah dialokasikan sebesar Rp1 triliun.



NOMINASI

FOTO JURNALISTIK

Mochammad Risyal Hidayat

Antara Foto

Be Strong



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Suharto
Radar Malang
Membatik Bersama



Ibu-ibu belajar membatik saat ajang Gelar Batik Malangan dan Poduk Unggulan kota Malang di gedung Kartini, Malang, Jawa Timur (23/10/2020). OJK mencatat, kredit perbankan di Wilayah Malang Raya pada Agustus tumbuh 5,72 persen (yoy) sedangkan relaksasi kredit UMKM sebanyak 69.452 debitur dengan baki debet sebesar Rp5,88 triliun dan 16.078 debitur non UMKM dengan baki debet sebesar Rp2,92 triliun.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Utoyo
Radar Cirebon
Geliat UMKM Kerupuk



Sejumlah pekerja di kawasan industri kerupuk ikan Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tengah menjemur kerupuk, Kamis (17/9/2020). Sektor UMKM kerupuk ini juga terkena imbas covid-19 dengan menurunnya tingkat penjualan. Beruntung UMKM ini masih bisa bertahan, karena para pengusaha bisa mendapatkan relaksasi atau keringanan kredit, berkat adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

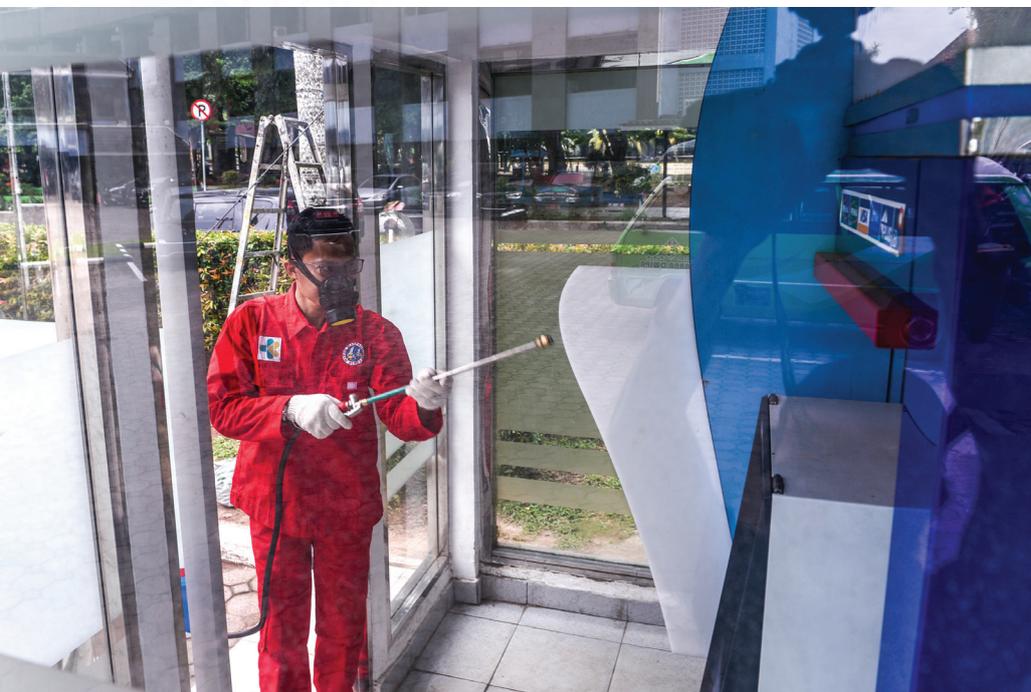


Mitra Driver Gojek membeli pesanan bahan pokok di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Pasar Minggu, Jakarta, Senin (6/4/2020). Pembelian lewat aplikasi Gojek mempermudah masyarakat untuk tetap dirumah dengan harga yang lebih murah dibanding pasar lain.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Khairizal Anwar
Rakyat Merdeka
Beli Bahan Kebutuhan
Pokok Lewat Aplikasi



Petugas sedang melakukan penyemprotan disinfektan di mesin ATM di Jalan Merdeka Palembang, Jumat (20/3/2020). Berbagai kegiatan dan aktifitas layanan perusahaan-perusahaan di Industri Jasa Keuangan seperti perbankan, perusahaan non bank, aktifitas pasar modal serta kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan di seluruh Indonesiayang tetap berjalan dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Mushaful Imam
Fornews.co
Disinfektan Untuk ATM



NOMINASI FOTO JURNALISTIK

Bram Selo Agung Mardika

Detikcom

Sektor Jasa Keuangan
Terkendali Di Tengah Pandemi



Warga berpakaian superhero Power Rangers mengunjungi kantor OJK di Solo, Jawa Tengah, Rabu (4/11/2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ketahanan sektor jasa keuangan masih dalam kondisi baik dan terkendali di tengah pandemi Covid-19. Itu ditunjukkan dengan permodalan dan likuiditas memadai serta profil risiko yang masih terjaga.



NOMINASI FOTO JURNALISTIK

Darmono

Radar Malang

Peran OJK Dalam Masa
Pemulihan Ekonomi



Produsen celana Emba di Kota Malang menjadi produsen APD selama masa pandemi, Jumat (17/4/2020). Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan 4,8 juta UMKM mendapatkan dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dana yang telah dialokasikan sebesar Rp1 triliun.



Pekerja membuat lele asap di Pengasinan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2020). Dalam satu hari UMKM kuliner ini bisa memproduksi 4-5 kuintal ikan lele yang dijual ke Jabodetabek dan hingga diekspor ke Nigeria dengan harga jual Rp100 ribu per kilogram.



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Muhamad Solihin
Viva.co.id
Industri Kuliner Lele Asap



NOMINASI
FOTO JURNALISTIK

Tedy Octariawan
Rakyat Merdeka
Berharap Pemerintah
Kucurkan Bantuan

Pedagang merapikan barang dagangannya di kios miliknya, yang tutup sementara di Skybridge alias Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Sejak ditutup sekitar 3 pekan lalu pada 27 Maret 2020 lalu hingga batas yang belum pasti akibat "Physical Distancing", kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pedagang di kawasan Pusat Grosir terbesar di Asia Tenggara ini mengaku mengalami kerugian yang tak terhitung, mulai dari pembatalan pembelian hingga tertahannya barang mereka untuk persiapan Lebaran, di kios dan gudang akibat tidak ada perputaran uang, dari itu mereka meminta Pemerintah mengucurkan bantuan untuk menjaga stabilitas sektor UMKM dari tekanan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.



ONE OJK
Bakti Membangun Negeri

WWW.OJK.GO.ID